SENIN, 7 SEPTEMBER 2026

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

Rakyat Merdeka Group

BANTEN POS

Kota Serang memiliki modal besar untuk membangun ekosistem pariwisata yang besar. Lokasi ini memiliki wisata religi, sejarah, budaya, kuliner, perdagangan hingga ruang publik dalam wilayah yang relatif berdekatan. Bagaimana pemerintah daerah di Kota Serang maupun di Provinsi Banten memperlakukan potensi ini?

BACA LENGKAP HAL-06

MENGGAGAS KONEKSI BANTEN LAMA - ROYAL BAROE

FISKAL LEMAH, ANDALKAN INVESTOR

07

ADA UNTUNG, CUMA ENGGAK GEDE,

07

FOTO:DZIKI OKTOMAULIYADI/BANTEN POS

SAAT DEBU GAK 'MENYERBU'
08 LAPORAN UTAMA

GARUDA MUDA BERJAYA
09

BISA DONGKRAK PAD, CILEGON BIDIK PAJAK KAFE DAN RESTORAN
04

TERVERIFIKASI DEWAN PERS
SCAN BARCODE UNTUK MELIHAT

TERVERIFIKASI DEWAN PERS

BANPOS CHANNEL | WWW.BANPOS.CO | BANTENPOS@GMAIL.COM | BANTEN_POS | BANTEN POS

HARGA ECERAN
RP 4.000

Delapan Bulan, 914 Kasus Kekerasan Terjadi di Banten

SERANG, BANPOS – Sebanyak 914 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat di Provinsi Banten sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 531 kasus menimpa anak dan 383 kasus lainnya melibatkan korban dewasa.

Angka tersebut sudah mencapai sekitar 63 persen dari total kasus yang tercatat sepanjang 2025. Pada tahun lalu, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Banten mencatat 1.456 kasus sepanjang Januari hingga Desember, terdiri atas 914 kasus dengan korban anak dan 542 kasus dengan korban perempuan dewasa.

Kepala UPTD PPA Banten, Purwadi, mengatakan data 2026 merupakan rekapitulasi laporan yang diterima hingga awal September dengan periode kejadian Januari sampai Agustus. "Secara keseluruhan di tingkat provinsi itu ada 914 kasus. Yang anak itu 531, kemudian dewasa itu 383," ungkap Purwadi kepada BANPOS.

Meski baru berjalan delapan bulan, kasus dengan korban anak pada 2026 telah mencapai sekitar 58 persen dari jumlah kasus anak sepanjang 2025. Sementara kasus dengan korban dewasa telah mencapai sekitar 71 persen dari jumlah kasus dewasa pada tahun sebelumnya.

Purwadi mengatakan angka tersebut masih berpotensi bertambah karena pencatatan 2026 belum mencakup satu tahun penuh. Namun, peningkatan laporan tidak serta-merta menunjukkan jumlah kejadian kekerasan meningkat.

Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi tingginya laporan adalah semakin beraninya korban maupun keluarga korban mengungkapkan kekerasan yang dialami. "Jadi kelihatannya di tahun ini meningkat. Mudah-mudahan ke depannya sudah landai, tidak sebesar yang di awal-awal bulan ini," ujarnya.

Ia menjelaskan, tidak seluruh 914 kasus tersebut ditangani langsung UPTD PPA Provinsi Banten. Penanganan dilakukan berdasarkan pembagian kewenangan dan standar layanan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), termasuk melalui UPTD PPA kabupaten/kota. Dari total tersebut, UPTD PPA Provinsi Banten menangani 56 kasus, terdiri atas 37 kasus dengan korban anak dan 19 kasus dengan korban dewasa.

Purwadi mengatakan masyarakat kini memiliki sejumlah kanal untuk melaporkan kasus kekerasan, mulai dari SAPA 129 milik KemenPPPA, hotline UPTD PPA Provinsi Banten hingga hotline UPTD PPA kabupaten/kota. Menurutnya, laporan melalui kanal tidak langsung justru lebih banyak dibandingkan korban atau keluarga yang datang langsung ke kantor. Mekanisme tersebut memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan tanpa harus mendatangi kantor pelayanan. "Kalau menurut saya masyarakat kita sekarang sudah mulai berani untuk speak up terhadap kasus atau yang sedang dialaminya," katanya.

Namun, meningkatnya laporan juga menunjukkan kemungkinan masih adanya kasus lama yang baru terungkap. Purwadi menyebut sejumlah kasus yang dilaporkan pada 2026 ternyata terjadi beberapa tahun sebelumnya. "Memang ada itu kasus yang sudah lama. Kasus-kasus lama, dia baru berani buka itu ya di tahun ini. Ada yang empat tahun ya, empat tahun sudah berlalu itu berani buka, sekarang ada," ungkapnya.

Kondisi tersebut, kata dia, mengindikasikan masih adanya fenomena gunung es dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus yang tercatat belum tentu menggambarkan seluruh kejadian yang terjadi di masyarakat karena masih ada korban yang belum berani melapor. Selain itu, Purwadi menyoroti kasus kekerasan yang bermula dari interaksi melalui telepon seluler dan ruang digital. Ia meminta masyarakat, terutama anak dan keluarga, berhati-hati berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal. "Banyak kasus dari 914 ini, melalui HP," ujarnya.

Salah satu modus yang ditemukan, lanjut Purwadi, yakni pelaku membujuk korban mengirimkan foto atau video pribadi. Materi tersebut kemudian dapat digunakan untuk mengancam atau memeras korban. Karena itu, ia mendorong korban maupun keluarga segera melapor apabila mengalami kekerasan. Pengaduan dapat dilakukan melalui kanal yang tersedia dan tidak harus datang langsung ke kantor.

Bagi korban yang kesulitan berbicara secara langsung, laporan tertulis dapat menjadi pilihan. Petugas selanjutnya melakukan asesmen untuk menentukan bentuk pendampingan yang dibutuhkan, seperti bantuan hukum, konseling dan layanan psikologis. "Yang penting ada identitas dirinya disampaikan kepada kita. Nah itu menjadi dasar kita supaya kita bisa melakukan assessment terhadap korban," jelasnya.

Dalam kondisi korban menghadapi ancaman, UPTD PPA dapat memberikan perlindungan melalui Rumah Perlindungan Sementara (RPS). Layanan tersebut diberikan maksimal sekitar dua minggu, dengan masa tujuh hari yang dapat diperpanjang satu kali. "Kalau memang korbannya terancam, itu bisa dititipkan di kita, maksimalnya itu dua minggu ya, bisa ada di kita, satu kali tujuh hari," katanya.

Purwadi menegaskan, perlindungan juga mencakup kerahasiaan identitas korban dan keluarganya. "Jelas, sangat dilindungi, karena memang kita sebagai petugas itu wajib melindungi terhadap identitas korban, dan kejadiannya harus kita lindungi," tandasnya. (MYU/PAY)

Polda Banten Gagalkan Pengiriman 150 Ribu BBL Ilegal

SERANG, BANPOS – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten menggagalkan dugaan pengiriman ilegal 150 ribu ekor Benih Bening Lobster (BBL) dari wilayah Banten menuju Palembang, Sumatera Selatan. Pengungkapan dilakukan Jumat (4/9) sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Tol Jakarta-Merak Km 71, Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Polisi mengamankan satu unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bernomor polisi BE 8739 NBB yang dikemudikan pria berinisial FIR.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Kombes Pol Yudhis Wibisana, mengatakan pengungkapan bermula dari informasi mengenai dugaan pengiriman BBL menggunakan truk yang melintas di wilayah hukum Polda Banten. Petugas kemudian menghentikan dan memeriksa kendaraan tersebut. Dari pemeriksaan, polisi menemukan 30 kotak styrofoam berisi sekitar 150 ribu ekor BBL. "Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 30 box styrofoam yang berisi Benih Bening Lobster dengan jumlah keseluruhan sekitar 150.000 ekor," ujar Yudhis, Minggu (6/9).

Berdasarkan hasil penghitungan bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten, BBL yang diamankan terdiri atas 10 ribu ekor jenis Mutiara dan 140 ribu ekor jenis Pasir. Dari pemeriksaan awal, FIR mengaku mengambil BBL tersebut di wilayah Jayanti, Kabupaten Tangerang, untuk dikirim ke Palembang. Ia juga mengaku telah dua kali melakukan pengambilan dan pengiriman BBL ke wilayah tersebut.

Selain BBL, polisi mengamankan barang bukti berupa 26 kotak fiber, satu unit truk Mitsubishi Colt Diesel dan satu unit handphone merek OPPO warna hijau.

Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Banten, AKBP Dhoni Erwanto, mengatakan penyidik hanya menyisihkan sebagian BBL untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan. Sisanya dilepasliarkan karena masih hidup. "Untuk kepentingan penyidikan, kami menyisihkan sebanyak 60 ekor BBL jenis Mutiara dan 60 ekor BBL jenis Pasir. Selanjutnya, terhadap BBL yang tidak diperlukan sebagai barang bukti dilakukan pelepasliaran," kata Dhoni.

Pelepasliaran dilakukan di PSPL Caringin dengan melibatkan petugas Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PRL) Serang serta disaksikan petugas PSDKP Pandeglang.

Dari total BBL yang diamankan, sebanyak 9.940 ekor jenis Mutiara dan 139.940 ekor jenis Pasir dilepasliarkan. Dengan demikian, sebanyak 149.880 ekor BBL dikembalikan ke habitatnya. "BBL yang kami lepasliarkan sebanyak 9.940 ekor jenis Mutiara dan 139.940 ekor jenis Pasir, sehingga total yang dikembalikan ke habitatnya sebanyak 149.880 ekor," ungkap Dhoni.(MYU/PAY)

RUANG PUBLIK

Mengenal Desil, Memahami Cara Data Bekerja

Oleh: Nuri Taufiq
Analis Data di Badan Pusat Statistik (BPS)

Belakangan ini, kata desil semakin sering terdengar dalam percakapan sehari-hari. Orang mulai bertanya, "Saya desil berapa?" Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun, bagi sebagian keluarga, jawabannya dapat terasa penting.

Posisi dalam desil sering dikaitkan dengan akses terhadap berbagai program perlindungan sosial. Karena itu, ketika posisi desil berubah, muncul pula kekhawatiran apakah bantuan yang selama ini diterima akan berubah.

Kekhawatiran tersebut sebenarnya dapat dipahami. Ketika sebuah istilah statistik mulai berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, angka tidak lagi terasa sebagai angka. Ia dapat menjadi harapan, kekhawatiran, bahkan penentu keputusan.

Namun, mungkin kita perlu melihat desil dengan cara yang sedikit berbeda. Desil bukanlah label tentang siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Desil adalah cara untuk melihat posisi relatif seseorang atau keluarga dalam distribusi kesejahteraan.

Desil Sebagai Peta

Bayangkan sebuah peta. Ketika kita melihat titik pada peta, yang kita ketahui adalah posisi kita dibandingkan dengan tempat lain. Kita tidak serta-merta mengetahui seluruh cerita tentang tempat tersebut. Begitu pula dengan desil.

Secara sederhana, desil membagi penduduk atau keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Karena itu, desil bukan angka pendapatan. Ia juga bukan label permanen bahwa seseorang "miskin" atau "kaya".

Sebuah keluarga dapat mengalami perubahan kondisi ekonomi dan pada saat yang sama, posisi relatifnya dalam masyarakat juga berubah.

Keluarga yang sebelumnya berada pada kelompok bawah dapat bergerak ke kelompok yang lebih tinggi. Sebaliknya, keluarga yang sebelumnya relatif aman dapat mengalami tekanan ekonomi dan bergerak ke kelompok yang lebih rendah. Desil menunjukkan di mana kita berada, bukan seluruh cerita tentang bagaimana kita sampai di sana.

Ketika Pendapatan tak Mudah Diukur

Lalu, bagaimana posisi tersebut diperkirakan? Di sinilah kita mengenal *Proxy Means Test* (PMT). Secara sederhana, PMT adalah metode statistik untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan berbagai karakteristik yang dapat diamati dan diverifikasi.

Mengapa tidak langsung bertanya mengenai pendapatan? Karena pendapatan tidak selalu mudah diukur.

Sebagian masyarakat bekerja di sektor informal, memiliki pendapatan yang berubah-ubah, atau tidak memiliki catatan pendapatan yang lengkap. Dalam kondisi seperti ini, mengukur kesejahteraan hanya dari pendapatan aktual dapat menjadi tantangan.

PMT kemudian menggunakan berbagai karakteristik rumah tangga yang memiliki hubungan dengan kesejahteraan. Kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, komposisi anggota rumah tangga, kepemilikan aset, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya dapat menjadi bagian dari informasi yang digunakan dalam model.

Analogi sederhananya seperti seorang dokter.

Dokter tidak menentukan kondisi kesehatan seseorang hanya dari satu gejala. Ia melihat tekanan darah, suhu tubuh, hasil pemeriksaan, riwayat kesehatan, dan berbagai informasi lainnya. Semua informasi tersebut kemudian dipertimbangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.

PMT bekerja dengan prinsip yang serupa. Bedanya, dokter menggunakan pengetahuan klinis, sedangkan PMT menggunakan model statistik. Karena itu, PMT bukan hasil tebakan.

Model dibangun dari data. Data rumah tangga yang memiliki informasi mengenai karakteristik sosial ekonomi sekaligus ukuran kesejahteraan digunakan untuk mempelajari hubungan di antara keduanya. Hubungan tersebut kemudian digunakan untuk membuat prediksi bagi rumah tangga lainnya.

Gagasan ini bukan sesuatu yang hanya digunakan di Indonesia. PMT telah lama digunakan dalam berbagai sistem perlindungan sosial di berbagai negara sebagai alternatif ketika pengukuran pendapatan secara langsung sulit dilakukan.

Namun, memahami PMT juga berarti memahami keterbatasannya. Tidak ada model statistik yang sempurna. PMT pada dasarnya adalah model prediksi. Karena itu, selalu ada kemungkinan hasil prediksi berbeda dengan kondisi sebenarnya.

Dalam literatur penargetan perlindungan sosial, hal ini dikenal sebagai *targeting error*. Ada *exclusion error*, ketika keluarga yang sebenarnya membutuhkan justru tidak masuk kelompok sasaran. Ada pula *inclusion error*, ketika keluarga yang sebenarnya tidak termasuk kelompok sasaran justru masuk ke dalam kelompok sasaran.

Penelitian Alatas dan kolega di Indonesia memberikan pelajaran menarik. Melalui eksperimen di 640 desa, mereka membandingkan beberapa pendekatan penargetan, termasuk PMT berbasis aset dan penargetan berbasis komunitas. Hasilnya menunjukkan bahwa PMT berbasis aset cenderung lebih baik dalam mengidentifikasi kelompok miskin, meskipun tidak berarti mampu menghasilkan penargetan yang sempurna.

Penelitian mengenai PMT juga semakin menekankan pentingnya validasi. Model tidak cukup hanya terlihat baik pada data yang digunakan untuk membangunnya. Ia harus diuji pada data lain untuk melihat apakah kemampuan prediksinya tetap baik.

Dengan kata lain, model statistik juga perlu terus "belajar". Masyarakat berubah. Struktur pekerjaan berubah, harga berubah, kepemilikan aset berubah dan pola konsumsi berubah. Karena itu, model yang dibangun dari kondisi masa lalu juga perlu dievaluasi agar tetap relevan dengan kondisi sekarang.

Data yang Bergerak Bersama Kehidupan

Di sinilah persoalan desil sebenarnya menjadi lebih menarik.

Kehidupan manusia tidak diam. Seseorang bisa mendapatkan pekerjaan baru. Sebaliknya, seseorang dapat kehilangan pekerjaan. Anak yang sebelumnya masih sekolah dapat lulus dan mulai bekerja. Anggota keluarga dapat bertambah, kondisi rumah dapat berubah dan penghasilan dapat naik atau turun.

Data seharusnya mengikuti perubahan tersebut. Karena itu, jika seseorang merasa posisi desilnya tidak lagi menggambarkan kondisi keluarganya, yang perlu dilakukan bukan memberikan informasi yang tidak sesuai agar posisi desil menjadi lebih rendah.

Yang perlu dilakukan adalah memperbarui data sesuai kondisi yang sebenarnya. Data yang benar bukan hanya data yang benar ketika pertama kali dikumpulkan. Data juga harus tetap relevan ketika kehidupan masyarakat berubah.

Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya. Sistem data kesejahteraan perlu menyediakan mekanisme pemutakhiran, validasi, dan koreksi. Model juga perlu dievaluasi secara berkala agar kesalahan penargetan dapat terus dikurangi.

Dengan demikian, kualitas sistem perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh satu rumus. Ia merupakan hasil dari rangkaian yang lebih panjang, data yang baik, model yang tepat, pembaruan yang rutin, verifikasi yang memadai, dan masyarakat yang bersedia memberikan informasi secara benar.

Mungkin karena itu, pertanyaan tentang desil tidak seharusnya berhenti pada, "Mengapa desil saya berubah?" Ada pertanyaan lain yang lebih penting: "Apakah data saya sudah menggambarkan kondisi saya saat ini?" Jika jawabannya belum, maka data perlu diperbarui.

Jika model masih memiliki kekurangan, maka model perlu disempurnakan. Jika masih ada keluarga yang membutuhkan tetapi belum terjangkau, maka mekanisme penargetan perlu diperbaiki.

Begitulah seharusnya kita memandang statistik. Statistik bukan sesuatu yang tidak boleh dikoreksi. Justru statistik yang baik adalah statistik yang terbuka untuk diuji, dievaluasi, dan diperbaiki.

Pada akhirnya, tujuan kita bukan membuat posisi desil seseorang serendah mungkin. Tujuannya adalah memastikan mereka yang membutuhkan tidak terlewat, sementara sumber daya negara dapat digunakan secara lebih adil dan tepat sasaran.

Desil hanyalah salah satu cara untuk membaca keadaan. Di balik angka tersebut selalu ada manusia, keluarga, dan kehidupan yang terus bergerak.

Karena itu, mungkin kita tidak perlu takut pada desil. Kita hanya perlu memahami cara kerjanya, menjaga kualitas datanya, dan bersama-sama membangun sistem yang semakin baik.

Ketika data semakin baik, kebijakan dapat menjadi semakin tepat. Dan ketika kebijakan semakin tepat, semakin besar pula peluang bantuan dan perlindungan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkannya. (*)

BANTEN POS
Inspirasi dan Semangat Baru Banten

PEMBINA
Kiki Iswara Dharmayana

KOMISARIS UTAMA
Karim Paputungan

KOMISARIS
Maria Hanief

DIREKTUR
Rumi Nugraha dan M. Fahmi

PT BANTEN BERITA MERDEKA
Kantor: Ruko RDM, Jln. TB Suwandi/Lingkar Selatan
Blok D, No.3, Kota Serang, Banten
Telephon/Fax: (0254) 407 8285
No. Rek: Bank BJB - 0018 21501 2001
BCA -2454 061 704
(a/n PT. BANTEN BERITA MERDEKA)

Percetakan:
WAHANA SEMESTA INTERMEDIA
Jl. Jampang No. 99A, Bekasi. Telp: 0811 1071 633

DEWAN REDAKSI: Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, M. Fahmi, Saepudin, Chandra Magga | **PEMIMPIN PERUSAHAAN:** Saepudin | **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB:** Chandra Magga | **REDAKTUR PELAKSANA:** Azmart Tusnedi | **REDAKTUR:** Ghuroofie Dzhillilhub, Stefano, Dedi Rustandi | **SEKRETARIS REDAKSI:** Cahya Andini | **REPORTER:** CH Widodo Haidar, Dede Suhada, Suganda, M. Wahyu, Taufiq Solehudin, Edwin Mahesa Pardede | **PENGEMBANGAN BISNIS:** Sobar Rohmat | **IKLAN:** Zulfa Nadira (Manager), Dody Fitriadi | **FOTOGRAFER:** Dziki Oktomauliyadi | **PRA CETAK & PERWAJAHAN:** Supriadi (Manager), Fauzi Sandi, M Sy Ian Sangadji | **GRAFIS:** Ahmad Bukhori | **ACCOUNTING:** Ifroh Hardianti | **ADMINISTRASI KEUANGAN:** Azi Abdurohman | **ADMINISTRASI PAJAK:** Nadia Al Vani | **ADMINISTRASI:** Nia Aryanti | **PEMASARAN:** Eply Wahyudi

PERWAKILAN TANGERANG :
Komplek Green Garden Blok A-1, No. 2
Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Banten

PERWAKILAN JAKARTA :
Gedung Graha Pena, Lantai 5
Jalan Kebayoran Lama No.12,
Jakarta Selatan
Telp/Fax: 021 - 53699624

PERCETAKAN :
PT. WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

TARIF IKLAN

TARIF IKLAN		ADVERTORIAL		IKLAN CILIK/BARIS
Hitam Putih (BW)	: Rp. 47.000/mm kolom	Hitam Putih (BW)	: Rp. 47.000/mm kolom	Rp. 23.000/baris
Warna (FC)	: Rp. 69.000/mm kolom	Warna (FC)	: Rp. 69.000/mm kolom	- Minimal 3 baris
Hitam Putih Hal. 1	: Rp. 91.000/mm kolom	SOSIAL/KELUARGA		- Maksimum 7 baris
Warna Hal. 1	: Rp. 134.000/mm kolom	Hitam Putih (BW)	: Rp. 30.500/mm kolom	
		Warna (FC)	: Rp. 54.500/mm kolom	

WARTAWAN BANTEN POS SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Proyek Yayasan Ditertibkan

BBWSC3 Keluarkan Teguran Keras

SERANG, BANPOS - Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) resmi bertindak merespons pelanggaran. BBWSC3 keluarkan teguran pertama kepada pengelola Yayasan Cinta Diri Sejati. Peringatan keras tersebut menyusul temuan proyek konstruksi ilegal pada sempadan Sungai Cikalumpang.

Lokasi pelanggaran tersebut berada tepat di Desa Kadubeureum kawasan Kecamatan Padarincang. Proyek itu terbukti melanggar tata ruang hukum Kabupaten Serang Provinsi Banten. Surat peringatan diterbitkan usai petugas melakukan inspeksi langsung menuju titik lokasi.

"Iya, jadi tanggal 31 Agustus kemarin memang kita sudah buat teguran ke yayasan," ujar Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWSC3 Arlinsyah.

Teguran ini bermula dari laporan keresahan warga sekitar aliran perairan. Laporan warga itu segera direspons tim pengawas lewat penerbitan berita acara peninjauan. Dokumen bernomor 10/BA.LAP/WASMAT/VIII/2026 tersebut dirilis pada 28 Agustus 2026.

Pemilik proyek wajib membongkar seluruh konstruksi liar di garis sempadan perairan. Semua pembangunan harus mematuhi Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015. Arlinsyah menyoroti tahapan administratif wajib yang diabaikan pihak pelaksana.

"Jadi teguran itu kita sampaikan bahwa Anda lewatkan satu proses, yaitu Anda tidak mendapatkan izin tapi melakukan tindakan tanggul ataupun sodetan yang tidak diizinkan," jelasnya.

Sungai merupakan bagian vital sumber daya air dalam kendali regulasi negara. Pemanfaatan sempadan dilarang dilakukan secara sepihak oleh instansi swasta. Pelaksana proyek wajib mengantongi izin kementerian resmi sebelum membangun struktur fisik.

Instansi pemerintah belum menetapkan sanksi penindakan hukum pada tahap peringatan pertama ini. Pengawas negara akan rutin memantau tingkat kepatuhan yayasan dalam menghentikan pengerjaan fisik. Pejabat berwenang segera melayangkan peringatan lanjutan bila teguran awal tersebut tetap diabaikan.

"Kalau masih beraktivitas, ya kami tegur yang kedua, segera kami keluarkan teguran kedua," ucap Arlinsyah.

Mekanisme peringatan bertahap ini akan terus dijalankan secara prosedural hingga surat ketiga. Instansi terkait bakal berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum guna menindaklanjuti pembangkangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan pemerintahan juga dipastikan siap dilibatkan penuh.

Kewenangan pengelolaan seputar sumber daya perairan murni berada pada tangan pemerintah pusat. Operasi penertiban lapangan kelak akan ditangani bersama oleh pejabat tingkat provinsi Banten. Kerja sama lintas sektoral terpadu dipastikan menjadi strategi pamungkas dalam menyelesaikan polemik.

"Trilateral itu, tiga komponen, Balai, Provinsi, dan Kabupaten pasti akan duduk bareng ini," tegasnya.

Praktisi hukum bernama Deni Hilman turut menyorot keras potensi ancaman jerat pidana. Deni mendasarkan analisisnya berpedoman regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perairan. Aturan tersebut telah diubah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 juga mengatur larangan pengalihan alur sungai. Sanksi administratif bidang kelestarian lingkungan hidup bisa dijatuhkan kepada pelanggar tata ruang. Pemulihan kerusakan lingkungan sekitar menjadi tanggung jawab mutlak dari pelaku perusakan ekosistem.

"Ada pelanggaran administrasi, ada persoalan kerugian atau pemulihan lingkungan, dan ada kemungkinan pidana apabila unsur tindak pidananya memang terpenuhi," ingat Deni.(CR02/AZM)

DP3AKB Catat 75 Kasus Kekerasan

SERANG, BANPOS - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Serang menunjukkan persoalan yang masih mengkhawatirkan. Hingga Juli 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang mencatat sedikitnya 75 laporan kekerasan, dengan perempuan menjadi kelompok korban yang paling banyak ditangani.

Kasus yang masuk ke DP3AKB bukan hanya kekerasan fisik. Laporan juga mencakup kekerasan verbal, kekerasan seksual hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kepala DP3AKB Kota Serang, Wasis Dewanto, mengatakan seluruh laporan tersebut ditangani melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

"Data di kami sampai bulan Juli itu sudah ada 75 laporan. Kami punya unit penanganan namanya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak," ujar Wasis, Jumat (4/9).

Menurutnya, korban berasal dari berbagai kelompok usia, mulai anak-anak hingga perempuan dewasa. Bahkan, kasus kekerasan seksual yang ditangani DP3AKB melibatkan korban berusia sekitar 17 tahun hingga anak berusia delapan tahun.

Media sosial disebut menjadi salah satu pintu masuk munculnya kerawanan baru. Kemudahan berkenalan dengan orang asing melalui platform digital dapat membuat perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban ketika perkenalan tersebut berujung pada pertemuan langsung.

Wasis mengatakan persoalan penanganan korban juga semakin kompleks karena lokasi tempat tinggal, sekolah dan tempat kejadian perkara (TKP) dapat berada di wilayah berbeda.

"Tempat tinggal di Kota Serang, sekolah di kabupaten lain, tapi tempat kejadian perkara di provinsi lain. Konsekuensinya, Pemerintah Kota Serang melalui DP3KB harus mendampingi ketika anak itu menjadi korban," katanya.

Selain kekerasan seksual terhadap anak, kasus KDRT terhadap perempuan juga masih menjadi bagian dari laporan yang ditangani UPT PPA.

Setiap laporan yang masuk terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengetahui kondisi korban dan menentukan bentuk perlindungan maupun pendampingan yang dibutuhkan.

Apabila perkara berlanjut ke jalur hukum, DP3AKB memberikan pendampingan mulai dari proses pelaporan hingga persidangan. Koordinasi dilakukan dengan aparat penegak hukum, termasuk Unit PPA Polres.

DP3AKB juga menyiapkan rumah aman bagi korban yang berada dalam kondisi terancam. Di tempat tersebut, akses komunikasi dengan pihak luar dapat dibatasi demi keselamatan korban. Pendampingan psikologis juga disediakan.

"Kita beri tempat yang betul-betul aman. Komunikasi dengan pihak asing kita batasi. Kita juga punya psikolog," ungkap Wasis.

Di tengah masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Wasis mengingatkan masyarakat untuk tidak menganggap remeh perkenalan melalui media sosial.

Ia meminta perempuan, khususnya usia muda, tidak menemui orang yang baru dikenal melalui media sosial seorang diri. Pertemuan sebaiknya diketahui dan didampingi keluarga atau orang yang dipercaya.

Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Wasis mengungkap adanya modus kekerasan seksual dengan mencampurkan zat tertentu ke dalam minuman korban hingga korban kehilangan kesadaran.

"Kalau berkenalan di media sosial, kemudian merasa sudah ada hubungan di antara keduanya, ketika ketemu dengan keluarga, jangan ketemu sendiri," tegasnya.(CR02/AZM)

Pemkab Dukung Riset Stranas Majukan UMKM Kreatif

SERANG, BANPOS - Pemkab Dukung Riset Stranas demi mendongkrak kualitas sektor industri kecil mandiri. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mengentaskan persoalan ekonomi kerakyatan daerah. Pemerintah meyakini kajian akademik sanggup memberikan solusi pemberdayaan masyarakat lokal kita.

Tim Peneliti Universitas Terbuka menggelar diskusi kelompok terpumpun pada hari Jumat pekan ini. Agenda sinkronisasi tersebut dilaksanakan secara langsung di ruang area Hotel Aston Serang. Forum ini dirancang khusus guna membangun sinergi kuat antar pemangku kepentingan utama.

"Kalau output penelitian ini memberikan dampak positif bagi UMKM Kabupaten Serang, tentu kami sangat menyambut baik," ujar Wakil Bupati Serang Muhamad Najib Hamas.

Diskusi ini berfokus menggali potensi besar usaha kecil menengah berbasis kebudayaan lokal. Riset tersebut juga meneliti secara cermat perihal pemanfaatan kecerdasan buatan beserta digitalisasi manajemen. Penguatan literasi dan intelijen keuangan bagi para pelaku usaha kecil pun menjadi prioritas.

Ketua Tim Peneliti Universitas Terbuka Julia Safitri memberikan penjelasannya secara sangat rinci. Kawasan strategis ini sengaja ditetapkan sebagai sebuah lokasi representasi wilayah Provinsi Banten. Sinergi komunikasi bersama aparat daerah diyakini sukses mempercepat misi penumbuhkembangan industri.

"Kami juga berharap penelitian ini dapat mengangkat potensi-potensi yang belum berkembang di Kabupaten Serang," tutur Najib menambahkan keterangannya saat sesi diskusi tersebut.

Forum perumusan kebijakan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting perwakilan aparat daerah. Instansi strategis daerah seperti Bapperida dan Diskominfo tampak sangat antusias mengikuti jalannya acara. Kehadiran perwakilan dinas terkait menunjukkan sebuah komitmen tinggi menyukseskan program pemerintah pusat.

Kajian konseptual Asta Cita ini menargetkan percepatan penciptaan strategi merek produk secara digital. Pemanfaatan berbagai data empiris di lapangan kelak segera diolah menjadi sebuah rumusan kebijakan dasar. Sang pimpinan birokrasi melontarkan harapan tertingginya terkait inovasi mutakhir ini.

"Dengan adanya program penelitian ini, kami berharap UMKM di Kabupaten Serang dapat semakin tumbuh dan berkembang, terutama dalam meningkatkan kualitas produk melalui pemanfaatan digitalisasi." Pungkasnya.(MPD/AZM)

Perkuat Sinergi Perbankan Gerakkan Ekonomi Daerah

SERANG, BANPOS - Pemkab Serang terus memperkuat sinergi dengan sektor perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya dengan menyapa langsung para nasabah pada peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026.

"Melalui momentum ini, Pemkab Serang memfokuskan sejumlah langkah strategis memotivasi para nasabah untuk terus mengembangkan skala usahanya dengan memanfaatkan fasilitas dan layanan perbankan secara maksimal demi kemandirian ekonomi," kata Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah saat bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengunjungi Bank bjb Kantor Cabang Khusus (KCK) Banten dan Bank Banten di Kota Serang, Banten, Jumat.

Pemkab Serang juga menerjunkan Tim Kesehatan UPT Puskesmas Kramatwatu untuk memberikan layanan cek kesehatan gratis (CKG) kepada para nasabah yang didominasi oleh pensiunan aparatur sipil negara (ASN), serta turut membaur dalam senam jantung sehat.

Ia juga menegaskan bahwa telah membawa jajaran strategis Pemkab Serang, di antaranya Kepala Bapenda, Diskan, BKPSDM, Dinkes, dan Bapperida, guna memastikan keselarasan program pemerintah daerah dengan dukungan sektor finansial.

"Oleh karena itu mari tumbuh bersama, buat bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan dari para nasabah itu tidak hanya mendukung perbankan, tetapi juga menggerakkan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di daerah kita," tuturnya.

Atas nama pemerintah daerah, ia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap peran aktif perbankan yang selama ini mendukung program-program pembangunan Pemkab Serang.

"Terima kasih juga kepada Bank bjb yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Serang khususnya," ujarnya.

Kepala Bank bjb KCK Banten Ida Farida Siregar menilai kehadiran pemerintah daerah memberikan dorongan moral yang kuat dalam ekosistem layanan perbankan.

"Ibu Bupati dan Direktur Operasional turut melayani dan membersamai para nasabah dalam melaksanakan transaksi hari ini. Ini memberikan semangat agar Bank bjb ke depan lebih baik. Jadi artinya kami sama-sama saling memberikan manfaat," kata Ida.(ANT/AZM)

ANTARA/HO-PEMKAB SERANG

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah (kanan) berjabat tangan dengan nasabah saat memperingati Hari Pelanggan Nasional di Serang, Banten, Jumat (4/9).

ANTARA

Dinas PUPR Kota Tangerang menerjunkan alat berat untuk pelebaran kali serua Ciledug.

Tingkatkan Daya Tampung, Kali Serua Ciledug Diperlebar

KOTA TANGERANG, BANPOS - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang memperlebar kali Serua di Kelurahan Tajur, Ciledug dari kondisi eksisting selebar 2-3 meter menjadi 6 meter agar daya tampung air jauh lebih besar.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas PUPR Kota Tangerang menerjunkan alat berat untuk memastikan aliran kali Serua bisa berjalan normal. Target pekerjaan bisa dilakukan selesai saat musim kemarau, sehingga saat musim hujan turun, bisa menampung air dengan maksimal.

Diungkapkan Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaeni panjang kali Serua yang dilakukan normalisasi, yakni sepanjang 900 meter. "Kita terus pantau dan mengimbau masyarakat tak membuang sampah sembarangan agar daya tampung kali bisa optimal," ujarnya, di Tangerang, Minggu (6/9).

Lurah Tajur Kurnain menekankan upaya normalisasi dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di sepanjang jalan Kali Serua setiap musim hujan tiba. "Kami bersama warga mendukung penuh normalisasi kali Serua. Kondisi musim kemarau saat ini bisa dimanfaatkan untuk mematangkan mitigasi dan mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi saat musim hujan," tambahnya.

Sebelumnya, Walikota Tangerang Sachrudin mengatakan persoalan banjir menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Tangerang dan membutuhkan kolaborasi lintas wilayah agar penanganannya dapat berjalan optimal. Pemkot Tangerang akan terus memaksimalkan seluruh unsur mulai dari camat, lurah hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempercepat penanganannya. "Persoalan banjir merupakan masalah lintas wilayah, sehingga membutuhkan kolaborasi dan kerja sama semua pihak. Karena itu, koordinasi akan terus kami perkuat bersama pemerintah provinsi maupun daerah sekitar agar penanganannya semakin optimal," pungkas Sachrudin. (ANT/PAY)

Bisa Dongkrak PAD, Cilegon Bidik Pajak Kafe dan Restoran

CILEGON, BANPOS - Pemerintah Kota Cilegon membidik sektor kafe dan restoran untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkot memperkirakan optimalisasi pajak dari sektor kuliner tersebut dapat menambah penerimaan hingga sekitar Rp15 miliar. Langkah tersebut dilakukan setelah Pemkot menilai potensi pajak kafe dan restoran belum tergarap maksimal akibat pendataan dan pengawasan yang belum optimal.

Walikota Cilegon Robinsar mengatakan, pihaknya saat ini melakukan pemetaan dan pendataan terhadap kafe serta restoran yang beroperasi di Kota Cilegon. Pendataan dilakukan untuk memastikan pelaku usaha memenuhi ketentuan perizinan dan kewajiban perpajakan. "Kita sedang petakan perihal pajak restoran dan kafe, dan sedang proses pendataan kafe dan restoran juga, karena harus menyetorkan pajak ke kas daerah," kata Robinsar, Jumat (4/9).

Menurut dia, potensi penerimaan dari sektor tersebut cukup besar seiring bertambahnya jumlah kafe dan restoran di Cilegon. Pemkot memperkirakan optimalisasi pajak dapat meningkatkan PAD sekitar 60 persen atau mencapai Rp15 miliar. "Kafe dan restoran baru kan banyak itu sekarang di Cilegon. Ini bukan menghambat investasi, tapi semua harus mengikuti tata tertib. Perkiraan PAD naik 60 persen, ya bisa dapat Rp15 miliar," ujarnya.

MUHAMAD ELFAN SETIAWAN/ BANTEN POS

Walikota Cilegon, Robinsar targetkan pajak kafe-restoran hingga Rp15 Miliar, Jum'at (4/9)

Robinsar mengatakan, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah mekanisme penyetoran pajak. Pajak yang dipungut dari masyarakat melalui transaksi di kafe dan restoran harus dipastikan masuk ke kas daerah. "Pajak itu kan sudah dipungut dari masyarakat melalui pembelian. Tetapi karena kurang pengawasan dan pendataan, pajak yang diperoleh pihak kafe dan restoran tersebut justru tidak disetorkan ke kas daerah," katanya.

Untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah kebocoran penerimaan, Pemkot Cilegon akan menerapkan digitalisasi dalam pemantauan transaksi dan pembayaran pajak. Sistem tersebut akan diuji coba mulai September hingga Desember 2026 dan ditargetkan berjalan efektif pada 2027. "September-Desember uji coba dulu, 2027 bakal berjalan efektifnya. Dari penerapan digitalisasi ini supaya dapat terpantau pajaknya, agar tidak ada lagi yang memanipulasi data," tegasnya.

Sebelum diterapkan penuh, Pemkot bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Pemkot juga memastikan optimalisasi pajak tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi. "Pertama kami akan sosialisasikan dulu, lalu melakukan peninjauan pajaknya. Pelaku usaha seperti kafe dan restoran itu harus mau mengurus izin dan bayar pajaknya juga," ujarnya.

Robinsar meminta pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pengurusan izin maupun pembayaran pajak untuk melaporkannya kepada Pemkot. "Kalau ada pelaku usaha yang mau melakukan izin tapi dipersulit atau bayar pajak sulit, nanti laporkan ke saya, bakal saya tindak," tegasnya.

Optimalisasi pajak kafe dan restoran menjadi bagian dari upaya Pemkot Cilegon mengejar target penerimaan pajak 2027 sebesar Rp60 miliar. Selain sektor kuliner, Pemkot juga tengah memetakan sumber potensi pajak lainnya, seperti pembangkit listrik mandiri dan pajak air tanah. "2027 itu target pajaknya Rp60 miliar, jadi harus bisa cari sumber potensi pendapatan yang lain," tandas Robinsar. (CR-03/PAY)

Bupati Maesyal Dorong DPK-IKAPTK Perkuat Sinergi dengan Pemerintah

ISTIMEWA

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, membuka Kongres DPK-IKAPTK Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatan tersebut Maesyal mendorong DPK-IKAPTK terus kuatkan sinergi jadi motor penggerak pembangunan daerah.

TANGERANG, BANPOS – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid membuka Kongres DPK-IKAPTK Kabupaten Tangerang di Hotel Vega Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Minggu (6/9). Dalam kegiatan tersebut, Maesyal meminta organisasi yang beranggotakan alumni pendidikan kedinasan tersebut memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.

Maesyal mengatakan, IKAPTK Kabupaten Tangerang memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Karena itu, kepengurusan yang terbentuk melalui kongres diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dan menjadi bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah. "Siapa pun yang terpilih harus kita percaya. Kalau yang senior, harus menjadi contoh dan aktif. Kalau yang muda terpilih, yang senior harus membimbing," ujar Maesyal.

Ia juga meminta pelaksanaan kongres berlangsung tertib dan sesuai mekanisme organisasi, baik melalui musyawarah mufakat maupun pemilihan. Menurutnya, pengurus yang terpilih nantinya harus menjalankan amanah sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Komunikasi dan koordinasi juga perlu terus dibangun, termasuk dengan pihak-pihak di luar alumni. "Tidak boleh ada perbedaan. Semuanya harus bersama-sama membangun Kabupaten Tangerang," katanya.

Maesyal juga meminta kepengurusan baru bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta memperluas komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. "Saya mohon kepada teman-teman yang sudah dipercaya, bekerjalah sesuai kapasitas dan kedudukan yang ada. Bekerjalah dengan baik dan bertanggung jawab. Kedua, bangun komunikasi, koordinasi dengan teman-teman yang nonalumni karena tanggung jawabnya sama dengan kita, tidak ada perbedaan dan pengakuan," imbuhnya.

Pembina DPK-IKAPTK Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengatakan, kongres tersebut menjadi agenda organisasi untuk memilih ketua dan kepengurusan periode 2026-2031. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjaga persatuan organisasi serta memberikan kontribusi bagi organisasi, negara, dan pembangunan Kabupaten Tangerang.

Ia berharap ketua terpilih mampu memperkuat persatuan anggota sekaligus membawa organisasi memberikan kontribusi bagi daerah. "Mudah-mudahan akan terpilih Ketua IKAPTK yang baru periode 2026-2031. Siapapun yang terpilih nanti harus menjadi perekat kita bersama untuk membawa organisasi ini lebih baik lagi, buat organisasi, negara, bangsa dan Kabupaten Tangerang," ujar Soma.

Hasil kongres kemudian menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Supriadi, sebagai Ketua DPK-IKAPTK Kabupaten Tangerang periode 2026-2031. Kepengurusan baru diharapkan dapat menjalankan program organisasi sekaligus memperkuat kontribusi alumni pendidikan kepamongprajaan dalam pembangunan Kabupaten Tangerang. (PAY)

Koleksi Buku Cilegon Masih Minim, DPK Ajak Warga Berdonasi

CILEGON, BANPOS – Kebutuhan koleksi buku di Kota Cilegon masih jauh dari standar ideal perpustakaan daerah. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 500.000 jiwa, Cilegon idealnya memiliki sekitar 1 juta eksemplar buku. Namun, koleksi yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Cilegon saat ini baru sekitar 20.000 eksemplar. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, DPK mengajak masyarakat menyumbangkan buku yang sudah selesai dibaca dan tidak lagi digunakan.

Kepala DPK Kota Cilegon Ismatullah mengatakan, kebutuhan koleksi tersebut mengacu pada standar perpustakaan daerah yang menetapkan jumlah buku ideal sebanyak dua kali jumlah penduduk. "Idealnya dua kali jumlah penduduk. Kalau penduduk Cilegon hampir 500.000, harusnya ada 1 juta buku. Artinya, kita masih butuh banyak koleksi buku di Kota Cilegon ini," ujar Ismatullah saat dikonfirmasi, Sabtu (5/9).

Menurut dia, pengadaan buku baru terus dilakukan setiap tahun melalui anggaran DPK. Namun, penambahan koleksi membutuhkan waktu karena setiap judul buku idealnya tersedia sedikitnya empat eksemplar. Dua eksemplar digunakan untuk layanan peminjaman, satu untuk dibaca di tempat, dan satu lainnya menjadi koleksi referensi yang tidak dipinjamkan. "Jadi setiap satu judul itu minimal empat eksemplar. Dua untuk dipinjamkan, satu untuk dibaca di tempat, dan satu untuk referensi yang tidak boleh dipinjamkan," jelasnya.

Karena itu, Ismatullah mendorong gerakan donasi buku menjadi budaya baru di masyarakat. Menurut dia, buku yang hanya tersimpan di rumah setelah selesai dibaca masih dapat memberikan manfaat apabila diserahkan kepada perpustakaan. "Daripada buku-buku yang sudah selesai dibaca hanya disimpan di rumah, lebih baik diserahkan ke perpustakaan. Karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli buku," katanya.

Dia mengatakan, gerakan tersebut tidak harus dilakukan pemerintah atau perpustakaan. Pejabat, tokoh masyarakat, birokrat, pelaku usaha maupun masyarakat umum dapat ikut menyumbangkan buku. "Ini yang ingin kita bangun, budaya baru. Unsur masyarakat, apakah pejabat, tokoh masyarakat, birokrat, eksekutif maupun masyarakat umum, bisa menyumbangkan buku-bukunya," ujarnya.

Ismatullah menilai, manfaat donasi buku dapat dirasakan lebih panjang dibandingkan bantuan material lainnya. Sebab, satu buku dapat dibaca banyak orang dan pengetahuan di dalamnya terus memberikan manfaat. "Kalau uang atau pakaian mungkin manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh penerima. Tetapi ketika seseorang menyumbangkan buku, kemudian buku itu dibaca dan memberikan pengetahuan kepada orang lain, nilai manfaatnya bisa berlipat," tuturnya.

Gerakan tersebut mulai mendapat respons dari sejumlah kalangan. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon, Atikoh, misalnya, kembali mendonasikan sekitar 100 buku untuk menambah koleksi perpustakaan. Atikoh mengatakan, donasi buku telah beberapa kali dilakukannya saat bertugas di sejumlah kantor, termasuk ketika menjadi kepala bidang di lingkungan perpustakaan. "Sudah beberapa kali. Tiga kali di kantor lama, sekarang lima kali, dan satu kali ketika saya menjadi Kabid Perpustakaan," kata Atikoh.

Sebelumnya, Atikoh juga menghibahkan novel biopik berjudul Berdetak Bersamamu yang mengisahkan perjalanan putranya, Restu Agatha Muhajir. Selain Atikoh, Ismatullah menyebut sejumlah kalangan lain turut menyumbangkan buku, di antaranya Dokter Ratih dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon.

ISTIMEWA

Kepala DPK Kota Cilegon, Ismatullah memperlihatkan buku donasi dari warga, Sabtu (5/9).

Di tengah keterbatasan koleksi, Cilegon justru mencatat capaian positif dalam layanan literasi. Ismatullah menyebut Kota Cilegon menjadi daerah dengan Tingkat Pengukuran Layanan Literasi Masyarakat (TPLM) tertinggi di Provinsi Banten dan mampu mempertahankan capaian tersebut.

Menurut dia, capaian tersebut perlu diimbangi dengan penambahan bahan bacaan agar masyarakat semakin mudah memperoleh buku dan pengetahuan. Harapan kita masyarakat ikut menyumbangkan buku. Kalau saya diberi buku, saya juga akan menyumbangkan lagi. Ketika kita memiliki kelebihan, alangkah lebih baik kita sumbangkan," pungkasnya. (CR-03/PAY)

DITEMUI DASCO, DEMO PPPK 7 SEPTEMBER BATAL

LEBAK, BANPOS - Aksi unjuk rasa Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Jakarta batal digelar. Awalnya, aksi tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada 7 September 2026.

Penyebabnya karena perwakilan dari masing-masing forum PPPK paruh waktu telah ditemui Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan itu berlangsung di ruang kerjanya pada Kamis (3/9) lalu.

Batalnya rencana aksi unjuk rasa itu kemudian turut diperkuat dengan munculnya surat pembatal dari Sekretariat Nasional (Seknas) Aliansi Merah Putih Gabungan Organisasi ASN PPPK Lintas Profesi. Surat bernomor 50/SEK-NAS/AMP/IX/2026 itu diterbitkan pada Kamis (3/9).

Dalam surat tersebut Ketua Seknas Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdilah, menyatakan bahwa berdasarkan pertemuan tersebut DPR RI menyepakati serta mengakomodir semua tuntutan yang disampaikan oleh aliansi. Namun, dengan syarat aksi unjuk rasa yang direncanakan akan digelar pada Senin (7/9) dibatalkan.

"Maka dengan kesepakatan tersebut kegiatan Silatnas sesuai jadwal "DIBATALKAN"," tulis Fadlu dalam surat tersebut sebagaimana dikutip BANPOS pada Minggu (6/9).

Ada empat poin tuntutan yang diajukan dalam pertemuan tersebut di antaranya pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu semua profesi baik teknis, nakes maupun guru pada tahun 2026.

Pengangkatan PPPK penuh waktu semua profesi baik teknis, nakes, maupun guru tanpa memandang usia menjadi PNS pada tahun 2027;

Kemudian realisasikan pengembangan karir bagi seluruh ASN PPPK pada tahun 2026. Terakhir, pengalihan sumber gaji ASN PPPK dari APBD ke APBN.

Surat pembatalan aksi itu turut ditandatangani oleh tujuh perwakilan forum PPPK. Pertama Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika; Forkomnas Lipkes, Bambang Utomo; FK-BPPPN, Erwin Kusumajaya.

Selanjutnya AP3KI, Nur Baitih; Penyuluh Agama Islam Indonesia, Sukamto; Aliansi R2 R3 Data Base BKN Indonesia, Faisol Mahardika; dan terakhir Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia, Herru Gama Yudha.

Batalnya rencana aksi unjuk rasa tanggal 7 September 2026 itu turut dibenarkan oleh Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Kabupaten Lebak, Robby Iswandi. Meski begitu, dia menegaskan, pihaknya akan tetap terus mengawal tuntutan tersebut hingga benar-benar direalisasikan.

"Tapi kita akan terus kawal sampai tuntas," tegasnya saat dihubungi BANPOS pada Minggu (6/9).

Di samping itu Robby mengingatkan seluruh PPPK paruh waktu, khususnya di Kabupaten Lebak untuk tidak cepat merasa puas atas hasil yang didapat saat ini. Menurutnya, tuntutan yang disampaikan masih perlu dikawal hingga benar-benar diwujudkan.

"Jangan euforia dulu, tetap akan kita kawal sampai tuntas," pungkasnya.(TQS/RUS)

Sampah di Pasir Bedeng Berserakan

LEBAK, BANPOS - Banyaknya tumpukan sampah yang mengusik kenyamanan warga akhirnya menjadi sasaran gotong royong.

Personel Kodim 0603/Lebak bersama Apemdes Muara Ciujung Timur, Polsek Rangkasbitung bersama warga turun langsung ke Kampung Pasir Bedeng, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Sabtu (5/9).

Usai dibersihkan, kawasan yang sebelumnya terlihat kumuh ditata kembali. Aparat dan masyarakat bergerak bersama, mengangkat, mengumpulkan, dan membersihkan berbagai jenis sampah yang berserakan.

Pada aksi tersebut terselip pesan yang jauh lebih besar. Ketika sampah terus dibuang sembarangan, lingkungan akan menjadi korban. Ketika kepedulian tumbuh, masyarakat sendiri yang akan merasakan manfaatnya.

"Melalui Karya Bakti Jumat Bersih, Kodim 0603/Lebak bergerak pedulian terhadap lingkungan, karena ini merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat," ujar Dandim Lebak, Letkol (inf) I Gede Mahendra Subrata.

Menurutnya, kebersihan bukan semata-mata urusan petugas kebersihan. Bukan pula hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat. Tetapi kebersihan adalah tangung jawab bersama.

Gotong royong di Kampung Pasir Bedeng menjadi bukti bahwa sinergi antara TNI, kepolisian, pemerintah setempat, dan masyarakat masih menjadi kekuatan penting dalam menghadapi persoalan lingkungan.

Dari tumpukan sampah, mereka mengirimkan pesan keras: jangan wariskan lingkungan yang kotor kepada generasi berikutnya. Di sini, TNI bersama rakyat. Peduli lingkungan. Mengabdi untuk negeri.(WDOL/RUS)

Salah seorang pemilik lahan persawahan, saat menunjukan kondisi tanaman padi yang terancam gagal panen.

Kemarau Panjang Rusak Ratusan Hektar Padi di Pandeglang

PANDEGLANG, BANPOS- Musim kemarau panjang yang sudah berlangsung selama lima bulan terakhir, memicu kerusakan parah pada sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang. Total seluas 867,5 hektar lahan padi dilaporkan mengalami kerusakan akibat kekurangan pasokan air.

Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang, Asep Mahpudin mengatakan, luas lahan terdampak tersebar merata di 20 kecamatan. Adapun tingkat kerusakan tanaman bervariasi mulai dari kategori ringan, sedang, berat, hingga mengalami kegagalan panen total atau puso.

"Dampak kemarau panjang selama lima bulan ini menyebabkan kerusakan padi seluas 867,5 hektar di 20 kecamatan," kata Asep kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Ia merinci, kerusakan kategori berat didominasi sejumlah wilayah sentra pertanian dengan luasan mencapai 124,5 hektar. Kondisi terparah tercatat di Desa Cikeusik yang menyumbang angka kerusakan berat hingga 30 hektar lahan pertanian.

"Kategori rusak berat tercatat seluas 124,5 hektar dengan contoh kasus di Desa Cikeusik yang mencapai 30 hektar. Petani kesulitan mendapatkan pasokan air irigasi sejak kemarau melanda wilayah mereka," kata Asep.

Selain kerusakan berat, puluhan hektar tanaman padi dilaporkan mengalami puso atau gagal panen total akibat kekeringan ekstrem.

"Kasus puso tercatat seluas 19 hektar dengan wilayah terparah berada di Kecamatan Sukaresmi, Desa Pasirkadu mencapai 10 hektar," ungkapnya.(DHE/RUS)

Menu MBG di Selatan Monoton

BGN Diminta Awasi Pengelola Dapur

BAKSEL, BANPOS - Badan Gizi Nasional (BGN) diminta melakukan pengawasan secara intensif terhadap dapur-dapur yang ada diwilayah Selatan Banten. Hal ini dilakukan agar sajian menu yang diberikan kepada sekolah memiliki gizi yang baik dan tidak membosankan.

Berdasarkan temuan dilapangan, sejumlah kepala sekolah (Kepsek) di Kecamatan Malingping, Lebak mengeluhkan menu MBG yang diterima para siswa-siswi karena dinilai kurang bervariasi. Mereka berharap menu yang disajikan dapat lebih beragam agar siswa tidak merasa bosan.

Salah seorang siswa di salah satu SDN di Desa Malingping Utara membenarkan bahwa menunya selalu berganti, dari telor dan ayam. "Paling menunya telor dan daging ayam, itu yang sering. Tak pernah ada daging kebo atau daging sapi. Maunya sih ada, jangan itu itu saja, jadi bosan," ungkap siswa bernama Kholik, saat ditanya BANPOS, Minggu (6/9).

Menu MBG yang diberikan pada siswa dari dapur SPPG di Malingping.

Keluhan lain muncul dari Kepsek SDN 1 Desa Cipendeuy, Ibnu Hadi, bahwa menu makanan yang diterima muridnya selama ini didominasi ayam dan telur sehingga perlu ada variasi dalam penyajiannya.

"Menurut saya, menu yang disajikan selalu itu-itu saja, kalau tidak ayam ya telur. Mungkin anak-anak juga bosan. Saya berharap ada nilai kreatifnya, jangan menunya itu-itu saja," ungkap Ibnu Hadi, Jumat pekan lalu.

Kepsek SDN 2 Cipendeuy, Iding, menyebut persoalan variasi menu tersebut juga telah beberapa kali disampaikan melalui grup komunikasi yang tersedia.

"Ya, seperti itulah, menu makannya itu-itu saja. Padahal ada grupnya dan sering diprotes di dalam grup, tapi kayaknya belum didengar," katanya.

Orang tua siswa, Suryana meminta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melakukan evaluasi terhadap variasi menu yang diberikan kepada siswa. Menurutnya, masukan dari pihak sekolah perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program MBG di lapangan berjalan semakin baik.?

"Keluhan dari pihak sekolah harus didengar dan dijadikan bahan evaluasi. Program MBG ini sangat baik, sehingga pelaksanaannya juga harus terus diperbaiki. Selain memenuhi kebutuhan gizi, variasi menu perlu diperhatikan agar anak-anak tidak bosan. Pihak SPPG juga harus membuka ruang komunikasi,"ujarnya.

Diketahui, makanan MBG yang disalurkan ke SDN 1 Cipendeuy dan SDN 2 Cipendeuy berasal dari SPPG Sumberwaras 2 yang berlokasi di Kampung Sukatani, Desa Sumberwaras, Kecamatan Malingping.

Hingga berita ini ditulis, pihak SPPG Sumberwaras 2 belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan mengenai variasi menu tersebut.(WDO/RUS)

IKLAN LARIS BANTEN POS
Info Iklan:
- 081334404392
- 087808831183

KEHILANGAN

HILANG BPKB, R4
NO. POL: A-257-K
NOKA: MHKF MR CEJ4K 001140
AN. PEMERINTAH DAERAH

HILANG BPKB, R4
NO POL: A-1473-KR
HOKA: MHKM1CB4JEK 036217
AN. H. SUKRÍ BIN SUWARTA (ALM).

HILANG BPKB, R4
NO.POL: A-9236-KB
HOKA: MHMF E 74 P5JK 184005
AN. Mahajana Cahaya Juwita

Tlh hilang 1 Unit BPKB Nopol A 1293 HL Merk Suzuki Thn 2003, No KA MHYESJ4103J095201, No Sin F10SID197771

Tlh hilang 1 unit BPKB Nopol A 1053 EA, Merk Toyota, No KA MHKE8FB3JKJ000397, No Sin 2NRF890966 Th 2019 No. BPKB P05549215H1

Tlh hilang 1 Unit BPKB Nopol B 4228 BVS Merk Yamaha Thn 2019 No Ka MH3SG4640KJ058554 No sin G3J8E0111887

Telah Hilang Sertifikat HGB no. 28030119.3.00602, Ds. Jatimulya, Rangkasbitung, L. 3080 M2. An. PT Makmur Multy Mega Mandiri

Telah Hilang BPKP Mobil Suzuki Pick Up, Warna Hitam, No. Mesin: G15AID1094223, No. Rangka: MHYESL415HJ803622, No. Pol. B 9571 CAH, No. BPKP: N05408218. Tahun 2017, atas nama NURUDIN, Alamat: Batuceper RT.02/03 Batuceper Kota Tangerang

Telah hilang sertifikat sebidang tanah Hak Milik SHM No 71 (28050404100071) dengan Luas 5.590 m2, jalan dumpit raya, kelurahan Gandasari kecamatan jatiuwung atas nama Tjapang.

KEHILANGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 64 ATAS NAMA SAIM SOEANI LUAS 3.827 m2 KELURAHAN KAMAL MUARA KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Telah Hilang BPKB Sepeda Motor Honda Vario 150 Ied old, Warna Cokelat, No. Mesin : KF11E2356488, No. Rangka : MH1KF1121HK359557, No. Pol. B 4174 BOI, No. BPKB : N06522410 Tahun 2017, atas nama HIE HERMAN, Alamat : Jl. Kamal Raya Rt. 11/9 Kalideres Jakarta Barat

MAKANAN

Jual/menerima pesanan Bubur Ayam Cianjur dan Lontong Sayur. **alamat:** Lampu merah Perumahan Graha Asri, Ciracas, Kota Serang - Banten Hub: Jejen 0878 7346 4053

MENGGAGAS KONEKSI BANTEN LAMA-ROYAL BAROE

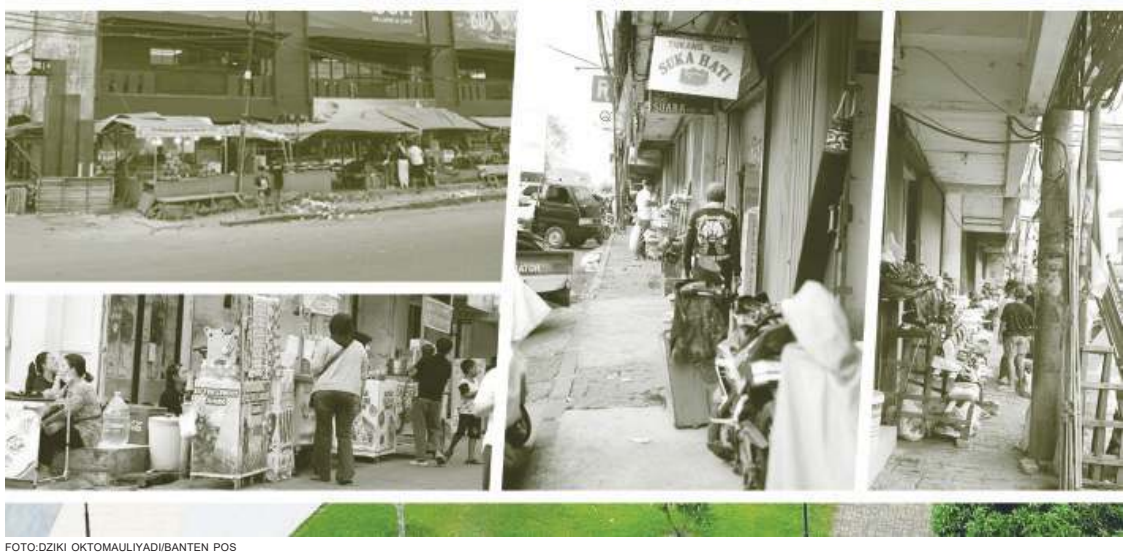

FOTO:DZIKI OKTOMAULIYADI/BANTEN POS

Kota Serang memiliki modal besar untuk membangun ekosistem pariwisata yang besar. Lokasi ini memiliki wisata religi, sejarah, budaya, kuliner, perdagangan hingga ruang publik dalam wilayah yang relatif berdekatan. Bagaimana pemerintah daerah di Kota Serang maupun di Provinsi Banten memperlakukan potensi ini?

Kota Serang dikenal memiliki satu obyek wisata yang sudah lama dikenal oleh wisatawan dari daerah lain, seperti Banten Lama. Belakangan, muncul obyek wisata yang tak kalah menarik, dari Pantai Gopek hingga Kawasan Royal Baroe. Kini jadi tantangan untuk pemerintah daerah, bagaimana mengkoneksikan obyek-obyek wisata itu agar tak bersifat parsial.

Gagasan tersebut disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dan Akademisi UNIBA, Malik Fatoni. Dia menilai, kehadiran Royal Baroe tidak semestinya diposisikan sebagai pesaing Banten Lama. Sebaliknya, kedua kawasan tersebut dapat saling memperkuat dengan membentuk jalur perjalanan wisata yang menawarkan pengalaman berbeda kepada pengunjung.

"Royal Baroe membawa wajah baru. Banten Lama membawa akar sejarah. Yang satu menawarkan masa depan, yang lain menjaga ingatan," demikian pandangannya.

Malik mengatakan, penataan Royal Baroe memang telah memberikan wajah baru bagi salah satu kawasan perkotaan di Kota Serang. Namun, keberadaan ruang publik yang lebih tertata tidak boleh menjadi tujuan akhir pembangunan.

Royal Baroe, kata dia, perlu dinaikkan kelasnya dari sekadar kawasan yang ramai dikunjungi menjadi ekosistem ekonomi dan pariwisata. Sebab, daya tarik sebuah tempat yang baru ditata biasanya memiliki efek kebaruan yang tidak berlangsung selamanya.

Karena itu, pemerintah harus mulai memikirkan alasan wisatawan untuk kembali datang. Ukuran keberhasilan pariwisata tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah pengunjung, tetapi juga harus melihat lama tinggal wisatawan, aktivitas ekonomi yang tercipta, kunjungan ulang dan manfaat yang diterima masyarakat.

"Apakah kita sedang membangun destinasi wisata, atau sekadar membangun tempat yang ramai dikunjungi?" menjadi pertanyaan yang menurut Malik perlu dijawab dalam pengembangan Royal Baroe.

Ia menilai Kota Serang memiliki keunggulan karena kawasan Royal Baroe dan Banten Lama dapat dirangkai menjadi satu perjalanan. Royal Baroe dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan perkotaan melalui aktivitas kuliner, perdagangan, ekonomi kreatif dan ruang publik. Sementara kawasan Kesultanan Banten memiliki kekuatan historis dan religius melalui Masjid Agung Banten, makam Sultan Maulana Hasanuddin, Benteng Surosowan, Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama serta peninggalan sejarah lainnya.

Dengan konsep tersebut, wisatawan yang datang ke Banten Lama tidak sekadar berziarah kemudian pulang. Mereka dapat diarahkan untuk melanjutkan perjalanan ke Royal Baroe dan menikmati berbagai aktivitas ekonomi kreatif dan budaya. Sebaliknya, pengunjung Royal Baroe juga dapat diperkenalkan dengan sejarah panjang Kota Serang dan Kesultanan Banten.

Malik menawarkan konsep *destination circuit* atau jalur pengalaman wisata. Salah satu gagasannya adalah paket *"Serang Heritage & Culinary Journey"*.

Dalam konsep tersebut, perjalanan wisata dapat dimulai dari kawasan Kesultanan Banten pada pagi hari. Wisatawan mengikuti wisata sejarah dan religi, kemudian menikmati kuliner serta produk UMKM lokal. Pada sore hari, perjalanan dilanjutkan menuju Royal Baroe untuk menikmati ruang publik, kuliner, pertunjukan seni, produk ekonomi kreatif dan aktivitas budaya.

Menurut Malik, konsep tersebut bukan sekadar strategi promosi, melainkan upaya merekayasa arus wisatawan agar memberikan dampak ekonomi lebih luas. "Ini bukan sekadar promosi. Ini adalah rekayasa ekosistem ekonomi wisata," tegasnya.

Malik Fatoni

Usep Saeful Ahyar

Malik juga mengingatkan agar Royal Baroe tidak hanya mengandalkan kegiatan atau event sebagai mesin untuk mendatangkan pengunjung. Event memang dapat menciptakan keramaian, tetapi belum tentu membuat wisatawan datang kembali setelah kegiatan selesai. Karena itu, Royal Baroe membutuhkan identitas dan cerita yang kuat. Pemerintah harus mampu menjawab apa yang membedakan kawasan tersebut dengan pedestrian, pusat kuliner maupun ruang publik di daerah lain.

"Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui kurasi budaya, kuliner, ekonomi kreatif dan narasi sejarah," ujarnya.

Di sisi lain, Banten Lama dinilai memiliki pasar wisata yang telah terbentuk secara alamiah melalui aktivitas religi dan sejarah. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan untuk memperluas pergerakan wisatawan tanpa menghilangkan karakter dan kesakralan kawasan.

Royal Baroe, menurut Malik, dapat menjadi penghubung antara arus wisatawan Banten Lama dengan pusat ekonomi kreatif Kota Serang. Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain membuat paket wisata Banten Lama-Royal Baroe, transportasi wisata tematik, kalender wisata bersama, paket kuliner dan UMKM, tur sejarah Kesultanan Banten, pertunjukan seni budaya, pusat informasi wisata terpadu, promosi digital bersama hingga sistem pemandu wisata terpadu.

"Dengan demikian, wisatawan tidak lagi berpikir: 'Saya mau ke Banten Lama.' Tetapi, 'Saya mau menikmati pengalaman wisata Kota Serang,'" katanya.

Malik mengingatkan pemerintah agar pembangunan kawasan publik tidak berhenti pada aspek *beautification*, seperti mempercantik jalan, memperlebar pedestrian, membangun gapura dan memasang penerangan.

Menurutnya, pembangunan destinasi justru baru dimulai ketika infrastruktur telah selesai. Karena itu, keberhasilan Royal Baroe harus diukur melalui indikator yang lebih substansial. Di antaranya lama tinggal wisatawan, pertumbuhan UMKM, transaksi ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, tingkat kunjungan ulang hingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Yang tidak kalah penting, masyarakat sekitar harus ditempatkan sebagai pelaku utama yang memperoleh manfaat ekonomi dari geliat pariwisata. Untuk memperkuat integrasi tersebut, Malik mendorong Pemkot Serang mempertimbangkan konsep Serang Tourism Pass.

Sistem tersebut dapat mengintegrasikan promosi dan perjalanan wisata melalui satu peta wisata, satu kalender event, satu platform digital, satu jaringan UMKM dan satu ekosistem transportasi. Ia mengusulkan narasi besar pariwisata Kota Serang berupa "Serang: Kota Sejarah, Religi dan Ekonomi Kreatif". Dengan konsep tersebut, wisatawan tidak sekadar membeli pengalaman di satu tempat, melainkan menikmati rangkaian pengalaman Kota Serang.

Pada akhirnya, Malik menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata tidak seharusnya hanya diukur dari kawasan yang viral atau pedestrian yang dipenuhi pengunjung. Royal Baroe harus hidup, Banten Lama tetap memiliki marwah spiritual dan historis, UMKM tumbuh, pelaku budaya memperoleh ruang, anak muda mendapatkan kesempatan ekonomi dan masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama.

"Royal Baroe dan Kawasan Kesultanan Banten bukan dua proyek pariwisata yang terpisah. Keduanya harus dibaca sebagai dua simpul dalam satu ekosistem pariwisata Kota Serang," tandasnya.

Tak berbeda jauh dengan Malik, peneliti dari Saung Hijau Indonesia (Sahid), Afriyanti, menilai Royal Baru membutuhkan strategi yang tidak hanya mengandalkan kunjungan masyarakat lokal. Kawasan yang dihuni puluhan hingga ratusan pelaku usaha tersebut membutuhkan arus pengunjung baru agar aktivitas ekonomi di dalamnya dapat bertahan secara berkelanjutan.

Keberadaan jutaan orang peziarah yang mendatangi kawasan Banten Lama dinilai belum sepenuhnya memberikan efek ekonomi bagi kawasan lain di Kota Serang. Salah satu peluang yang perlu dioptimalkan adalah mengalirkan sebagian aktivitas wisatawan dan peziarah menuju kawasan Royal Baroe.

Menurut Afriyanti, potensi tersebut sebenarnya sudah tersedia di depan mata melalui tingginya aktivitas wisata religi di Banten Lama. Persoalannya, arus wisatawan selama ini belum direkayasa agar turut menggerakkan kawasan ekonomi lain di Kota Serang.

"Banten Lama memiliki pasar yang sudah terbentuk. Tantangannya adalah bagaimana arus kunjungan tersebut bisa memberikan efek limpahan ekonomi kepada kawasan di sekitarnya," demikian gagasan yang disampaikan Afriyanti.

Ia menilai konsep *economic spillover effect* penting diterapkan dalam pengembangan kawasan wisata Kota Serang. Aktivitas ekonomi di satu destinasi seharusnya tidak berhenti di destinasi tersebut, tetapi dapat menciptakan perputaran ekonomi di wilayah lain yang terhubung. Dalam konteks ini, Royal Baru dapat menjadi salah satu kawasan penerima limpahan ekonomi dari tingginya kunjungan ke Banten Lama.

Namun, menurut Afriyanti, hal tersebut tidak akan terjadi dengan sendirinya. Pemerintah perlu melakukan rekayasa rute perjalanan, terutama terhadap kendaraan wisata dan bus rombongan peziarah. Salah satu gagasan yang dinilai layak diuji adalah menjadikan kantong parkir di kawasan eks Pasar Lama sebagai titik transit kendaraan wisata dari Banten Lama.

Kendaraan rombongan tidak harus masuk jauh ke kawasan perdagangan atau membawa seluruh penumpang hingga titik tujuan. Kendaraan dapat diparkir di kantong parkir utara, sementara wisatawan kemudian diarahkan berjalan kaki atau menggunakan moda transportasi penghubung menuju kawasan Royal Baru. Skema tersebut dinilai dapat meningkatkan *foot traffic* atau arus pejalan kaki di kawasan Royal Baru.

"Yang dibutuhkan bukan sekadar mendatangkan orang ke Royal Baru, tetapi membuat Royal Baru berada dalam rute perjalanan wisatawan," ujar Afriyanti.

Konsep tersebut sekaligus dapat menjadi bentuk *micro transit-oriented development* atau pengembangan kawasan komersial yang terhubung dengan titik transit. Dengan posisi kantong parkir yang strategis, aktivitas wisatawan tidak berhenti di tempat parkir. Mereka dapat diarahkan untuk berbelanja makanan, membeli produk UMKM, menikmati ruang publik, maupun mengakses aktivitas ekonomi dan budaya yang tersedia di Royal Baru.

Afriyanti melihat ketergantungan terhadap pengunjung lokal memiliki risiko tersendiri bagi keberlangsungan UMKM di Royal Baru. Berdasarkan kerangka kajian dalam pengembangan kawasan tersebut, terdapat sekitar 122 UMKM yang menggantungkan aktivitas ekonomi di kawasan Royal Baru. Jika pasar hanya mengandalkan warga sekitar, maka pertumbuhan transaksi berpotensi tidak cukup kuat untuk menjaga keberlangsungan seluruh pelaku usaha.

Karena itu, pasar wisatawan dari luar Kota Serang, khususnya rombongan peziarah, perlu dilihat sebagai pasar tambahan yang potensial. Apalagi Banten Lama memiliki karakter kunjungan yang berbeda dengan kawasan perdagangan biasa. Pengunjung datang dalam jumlah besar pada periode tertentu dan sebagian merupakan wisatawan dari luar daerah.

"Kalau arus manusia sudah besar, persoalannya tinggal bagaimana arus tersebut bisa dikoneksikan dengan pusat ekonomi lainnya," kata Afriyanti.

Sementara itu, Akademisi Universitas Serang Raya (Unsera), Usep Saepul Ahyar, menegaskan bahwa Pemkot Serang harus meluruskan diagnosis dasar atas penataan kawasan Royal Baru. Ia menilai kawasan tersebut pada hakikatnya adalah ruang publik dan pusat perdagangan warga lokal, bukan objek wisata daerah. Karena itu membandingkannya dengan Banten Lama menjadi sesuatu yang kurang tepat.

Usep menyampaikan bahwa keberadaan Royal Baru itu bukan objek wisata, melainkan ruang publik dan ruang dagang kota. Oleh karena itu, menurutnya penting agar menguatkan identitas dasar Royal Baru dipertahankan.

"Pasarnya warga Serang sendiri, bukan wisatawan luar daerah. Karena itu membandingkannya dengan Banten Lama kurang tepat, Banten Lama hidup dari ziarah, permintaannya datang dari luar dan digerakkan keyakinan, bukan oleh bagus tidaknya fasilitas," kata Usep.

Ia juga menyoroti indikator keberhasilan penataan yang dinilainya kurang tepat. Menurut Usep, Pemkot sebaiknya tidak mengukur kesuksesan kawasan berdasarkan tingkat kunjungan wisata, melainkan lewat jumlah pejalan kaki harian, durasi kunjungan (lama tinggal), serta tingkat keterisian lapak pedagang.

Terkait klaim omzet senilai Rp289 juta saat peluncuran, ia mengingatkan bahwa angka tersebut merupakan hasil kegiatan festival sesaat yang belum menghitung potensi pergeseran omzet dari kawasan Kepandean maupun Pasar Lama.

Oleh karena itu, Usep meminta Pemkot Serang untuk tidak lagi mengandalkan acara sesekali yang membebani APBD, melainkan menghadirkan kegiatan mingguan yang rutin dan konsisten bagi warga dan pedagang.

"Saya melihat ada ketegangan antara ketertiban dan keramaian. Kawasan itu dulu hidup justru karena ia pasar malam, padat, murah, informal. Penataan yang terlalu steril berisiko menghilangkan sumber keramaiannya sendiri. Jalan tengahnya bukan mengusir pedagang informal, tapi memberi mereka zona legal di dalam kawasan dengan aturan jam dan kebersihan yang jelas," jelas Usep.

Di samping penataan zona dagang, Usep mengingatkan pentingnya pemenuhan fasilitas dasar urban seperti kanopi peneduh, toilet publik yang layak, musala, pencahayaan, tempat duduk, hingga sistem pengelolaan sampah. Tanpa ketersediaan peneduh, kawasan terbuka tersebut dinilai akan sepi dan mati saat musim hujan.

Menanggapi wacana pemanfaatan eks Pasar Lama, menurut Usep penggunaan istilah *Transit Oriented Development* (TOD) saat ini dinilainya kurang tepat karena Kota Serang belum memiliki layanan angkutan umum massal. Konsep yang lebih sesuai untuk diterapkan yakni gedung parkir bersama atau *park-and-ride.*

Usep menilai rencana pembagian slot parkir antara Pasar Lama di pagi hari dan kawasan Royal di malam hari sudah cukup masuk akal karena perbedaan jam puncak keramaian. Namun, keberhasilannya bergantung pada tiga syarat utama yakni: Jarak jalan kaki di bawah 400 meter dengan trotoar yang aman, teduh, dan menerus. Tarif parkir di badan jalan (on-street) dibuat lebih mahal disertai penegakan hukum yang tegas. Serta gedung parkir beroperasi secara aman hingga malam hari.

"Dan satu hal harus didahulukan: survei okupansi parkir eksisting. Kalau parkir sekarang belum penuh di jam puncak, artinya parkir bukan kendala utamanya. Karena skemanya Bangun Guna Serah dan proyeksi pendapatannya diakui belum pasti, publik berhak menuntut lelang terbuka, plafon tarif, dan transparansi bagi hasil," tegasnya.

Terkait spesifikasi perkerasan untuk jalur bus pariwisata, Usep menjelaskan bahwa penggunaan paving block standar hanya cukup untuk beban pejalan kaki, namun akan bergelombang dalam satu hingga dua tahun jika dilintasi beban bus besar. Untuk jalur bus, kata dia, penggunaan perkerasan beton dengan perhitungan pondasi yang matang merupakan kebutuhan teknis yang mutlak.

Selain masalah perkerasan, ia menjabarkan bahwa fasilitas transit bus membutuhkan bus bay (teluk bus), radius putar yang memadai, serta ketersediaan lahan mengendap (layover space) agar bus yang selesai menurunkan penumpang tidak parkir di badan jalan dan memicu kemacetan baru.

Lebih jauh, Usep juga melihat adanya kontradiksi konsep antara menciptakan kawasan pejalan kaki yang nyaman dengan membiarkan bus pariwisata melintas di dalamnya. Dalam praktik perancangan kota yang lazim, area bus justru ditempatkan di bagian luar kawasan agar pejalan kaki dapat bergerak bebas di dalam.

"Terakhir, pengalihan arus bus tidak bisa diputuskan sepihak. Perlu kajian andalalin dan manajemen rekayasa lalu lintas, koordinasi dengan provinsi bila statusnya jalan provinsi, dan kesediaan operator. Rombongan ziarah ke Banten Lama berjadwal ketat dan belanjanya rendah; mereka tidak bisa dipaksa mampir. Mereka mampir kalau ada alasan konkret sepeti toilet bersih, musala, makan cepat, oleh-oleh, dan akses keluar yang tidak memutar. Bangun dulu alasannya, jalurnya belakangan," tegas Usep.(MYU/MPD/ENK)

FISKAL LEMAH, ANDALKAN INVESTOR

Upaya untuk menghubungkan kawasan Royal Baru dan destinasi wisata religi Banten Lama, tak sekedar wacana. Bahkan Pemkot Serang mengaku tengah membangun skema pembangunan menuju ke sana. Salah satunya dengan mengoptimalkan aset daerah di kawasan eks Pasar Lama untuk menunjang pengembangan kawasan Royal Baru.

Kepala Bidang Aset (Pengelolaan Barang Milik Daerah) BPKAD Kota Serang, Arif Hidayat, mengatakan aset eks Pasar Lama saat ini telah menjadi milik Pemkot Serang setelah proses penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Serang. Namun, kondisi bangunan yang ada saat ini masih apa adanya sehingga belum dilakukan pembangunan untuk menunjang fungsi kawasan tersebut.

Menurut Arif, hubungan kerja sama terkait bangunan pasar lama dengan pihak ketiga sebelumnya telah berakhir pada 2022. Sejak saat itu, Pemkot Serang melakukan penertiban dan pengelolaan terhadap aset tersebut, meski masih menghadapi keterbatasan fiskal untuk melakukan pembangunan.

"Untuk saat ini aset itu sudah milik Pemerintah Kota Serang dan memang secara sumber perolehan penyerahan dari kabupaten," kata Arif.

Ia menjelaskan, pengelolaan aset eks Pasar Lama berbeda dengan mekanisme pemanfaatan sejumlah aset lainnya. Saat ini kawasan tersebut masih dimanfaatkan masyarakat, sementara dari sisi penataan pasar, terdapat rencana relokasi aktivitas perdagangan.

Arif mengatakan, setelah aktivitas pasar direlokasi, eks Pasar Lama diarahkan untuk dikembangkan sebagai kawasan penunjang Royal Baru. Salah satu fungsi yang sedang diwacanakan adalah sebagai kantong parkir, terutama untuk mendukung mobilitas wisatawan menuju kawasan Banten Lama.

Namun, konsep yang disiapkan tidak sekadar menyediakan lahan parkir. Di kawasan tersebut juga direncanakan berbagai fasilitas pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat,

Endad Haryanto

seperti area berkumpul serta kemungkinan kantor pelayanan pemerintahan.

"Sedangkan untuk eks pasar lama nantinya dilakukan pembangunan untuk menunjang kegiatan di Royal Baru dan sekitarnya, termasuk misalkan mau ke wisata religi di Banten Lama sana, kaitan dengan kantong parkir," ujarnya.

"Secara konsep juga bukan hanya sebatas kantong parkir. Tapi di dalamnya ada sarana-sarana yang bisa dibilang menunjang kegiatan perekonomian. Misalkan area berkumpul, mungkin kantor-kantor pelayanan nanti disiapkan juga di situ," sambungnya.

Meski memiliki potensi strategis, pembangunan kawasan eks Pasar Lama menghadapi persoalan pembiayaan. Arif mengakui kemampuan fiskal Pemkot Serang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan skema pengembangannya. Karena itu, Pemkot Serang mulai mengkaji keterlibatan pihak ketiga untuk membangun sekaligus mengelola fasilitas yang dibutuhkan.

"Makanya pembiayaan untuk pembangunan sarana-sarana itu dibebankan ke pihak ketiga. Jadi intinya kita butuh bangunan, cuma pihak ketiga yang bangun, mereka yang kelola," jelas Arif.

Skema yang tengah dikaji adalah bangun guna serah, yang sebelumnya dikenal luas dengan istilah *build operate transfer* (BOT). Mekanisme tersebut mengacu pada ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diubah melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Dalam skema tersebut, pemerintah menyediakan aset yang dimiliki, sementara pihak ketiga menyediakan pembangunan sarana yang dibutuhkan. Selanjutnya, pihak ketiga mengelola fasilitas tersebut dalam jangka waktu sesuai perjanjian.

Sebagai imbal balik atas pemanfaatan aset, pemerintah daerah memperoleh kontribusi dari pihak ketiga.

"Dalam jangka masa waktu perjanjian, pihak ketiga ini melakukan pengelolaan dan muncul kewajiban kepada pemerintah. Jadi nanti bentuk kontribusi ke pemerintahnya itu secara ketentuan namanya kontribusi tetap," katanya.

Kontribusi tersebut nantinya disetorkan ke kas daerah setiap tahun. Besarannya akan dihitung berdasarkan analisis bisnis yang memperhitungkan nilai investasi pihak ketiga serta aset yang disediakan pemerintah.

"Investasi dari pihak ketiga berapa, investasi Pemerintah Kota Serang dalam hal ini aset itu berapa, nanti di situ ada bagi hasil, berapa persen, berapa persen, nah itu setiap tahunnya ditransfer ke Pemerintah Kota Serang," jelasnya.

Selain kontribusi tetap, Arif menyebut terdapat mekanisme pemanfaatan sebagian hasil pembangunan secara langsung oleh pemerintah daerah. Dalam skema yang tengah dikaji, sekitar 10 persen dari hasil pembangunan dapat dimanfaatkan Pemkot Serang untuk kebutuhan pelayanan pemerintahan. "Misalkan dari 100 lot lahan parkir, yang sepuluhnya itu menjadi hak pemerintah daerah untuk digunakan langsung," ujarnya.

Pemanfaatan tersebut, kata Arif, dapat diarahkan untuk fasilitas pelayanan seperti Samsat maupun unit pelaksana teknis (UPT) lainnya. "Jadi bukan hanya kontribusi tetap tapi juga pemanfaatan sebagian hasil pembangunannya langsung dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Serang," katanya.

Lebih luas, BPKAD Kota Serang juga tengah melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang memiliki potensi untuk mendukung pengembangan pariwisata. Arif mengatakan, inventarisasi menjadi langkah awal untuk mengetahui potensi sekaligus menentukan skala prioritas optimalisasi aset.

Untuk kawasan penopang Royal Baru, sejumlah aset yang menjadi perhatian antara lain alun-alun, taman kota dan eks Pasar Lama.

"Yang utama kan kita lakukan inventarisasi dulu ya, untuk mengukur potensi skala prioritasnya," ujarnya.

Setelah inventarisasi, langkah berikutnya adalah memastikan aset dalam kondisi aman secara administrasi, fisik dan hukum. Hal itu dilakukan untuk memastikan status aset jelas sebelum dikembangkan.

"Kita lakukan pengamanan aset dalam hal pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Itu kita lakukan untuk memastikan *clean and clear*," kata Arif.

Menurutnya, langkah tersebut penting karena masih terdapat aset daerah yang menghadapi persoalan hukum maupun sengketa. Untuk aset-aset di kawasan yang menjadi perhatian, ia menyebut sebagian besar telah melalui proses pengamanan dan sertifikasi.

Setelah status aset dipastikan, BPKAD akan melihat skema pemanfaatan yang paling sesuai. Aset dapat digunakan langsung oleh organisasi perangkat daerah (OPD), atau dioptimalkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga apabila dinilai memiliki potensi ekonomi.

Arif mencontohkan rencana keberadaan UPT Royal Baru. Jika terealisasi, aset yang berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan kawasan dapat diberikan kewenangan kepada OPD terkait. Begitu pula dengan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif maupun UMKM. Aset yang memiliki potensi untuk mendukung program tersebut dapat diberikan kepada OPD yang memiliki kewenangan untuk mengelolanya.

"UMKM itu kan di Indakop untuk melakukan optimalisasi terhadap aset tersebut," katanya.

Menurut Arif, optimalisasi aset tersebut merupakan bagian dari langkah yang lebih masif dilakukan Pemkot Serang dalam menggerakkan potensi ekonomi kawasan. Namun, ia menegaskan seluruh proses tetap harus berjalan sesuai prosedur dan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

"Dari sisi aset kita pastikan secara prosedur sesuai dengan ketentuan," tandasnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Endad Haryanto menyampaikan, dalam rangka ikut bersinergi meramaikan lokasi wisata baru di Kota Serang yakni Royal Baroe. Pemprov Banten, kata Endad, tengah mencanangkan pengembangan trayek Bus Trans Banten agar melintas di beberapa lokasi wisata termasuk Royal Baroe dan wisata religi Banten Lama. Kendati demikian, Endad mengungkapkan, jika langkah tersebut masih dalam kajian sembari menghitung dan mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan.

"Trans Banten memang sudah memiliki rencana pengembangan jaringan trayek ke Banten lama, seperti trayek Baros - Banten Lama, pelaksanaan trayek tersebut masih menunggu ketersediaan anggaran," katanya.

Endad mengatakan, Dishub Banten saat ini sedang berkoordinasi dengan Dishub Kota Serang untuk penyediaan angkutan umum *feeder* atau layanan pengumpan yang berfungsi untuk menjadi penghubung dengan trayek Banten lama - Terminal Cipocok untuk rute Banten lama-Royal Baru- terminal pakupatan-terminal Cipocok. Langkah ini, kata dia, sebagai bentuk sinergitas antara Pemkot Serang dengan Pemprov Banten.

Lebih lanjut, Endad juga mengatakan dalam mengatasi keterbatasan anggaran dalam pengembangan jaringan trayek Trans Banten di tahun 2027, Dinas Perhubungan Provinsi Banten telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui kantor BPTD kelas II Banten.

"Kita sudah berkoordinasi melalui BPTD Kelas II Banten untuk pengusulan angkutan subsidi dengan trayek Terminal kepandean - Terminal Kalijaga (rute Terminal Kepandean-Ciracas-KP3B-Petir-Terminal Kalijaga Rangkasbitung) dan trayek Terminal Cipocok-Puspemkab Serang (Via RS. Adhyaksa)," tegasnya.(CR02/MPD/ENK)

ADA UNTUNG, CUMA ENGGAK GEDE

Kawasan Pusat Keramaian Royal Baroe di Kota Serang yang diresmikan Walikota Serang Budi Rustandi pada akhir 2025 mulai menjadi salah satu titik keramaian baru masyarakat. Namun, meningkatnya aktivitas dan jumlah pengunjung di kawasan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan omzet para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjualan di dalam maupun sekitar kawasan.

Sejumlah pedagang mengaku tetap mendapatkan pembeli, terutama pada akhir pekan. Kendati demikian, peningkatan transaksi dinilai belum signifikan. Sebagian pedagang bahkan masih mengandalkan kegiatan atau event tertentu untuk mendongkrak penjualan.

Salah seorang pedagang bakso tusuk, Tolib, mengatakan terdapat perubahan cukup signifikan terhadap jumlah dagangannya yang terjual setelah kawasan Royal Baroe dibangun. Menurutnya, sebelum kawasan tersebut ditata, pada hari biasa dagangannya mampu terjual sekitar 700 tusuk. Sementara pada akhir pekan, khususnya malam Minggu, penjualan bisa menembus lebih dari 1.000 tusuk.

Namun setelah Royal Baroe dibangun, penjualan pada hari biasa justru turun menjadi sekitar 300 tusuk. Sedangkan pada akhir pekan, penjualan berada di kisaran 700 hingga 1.000 tusuk. Tolib menduga kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi perubahan lokasi berjualan. Sebelumnya, ia berjualan di bagian depan sehingga lebih mudah diketahui pelanggan lama. "Penyebabnya kalau menurut saya kayaknya belum pada tahu kalau saya lokasinya di sebelah sini. Masih ada orang yang belum tahu kalau saya jualan di sebelah sini. Dulu saya di depan," ungkapnya.

Meski begitu, Tolib mengakui keberadaan Royal Baroe tetap memberikan geliat terhadap usahanya, terutama ketika kawasan tersebut dipadati pengunjung pada akhir pekan. Saat ini, omzet yang diperolehnya rata-rata mencapai sekitar Rp1 juta per hari. "Omzet sekarang bakso tusuk saya kira-kira Rp1 juta per hari," ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Serang tidak hanya mengandalkan keramaian rutin, tetapi juga menghadirkan kegiatan yang mampu mendorong pengunjung untuk melakukan transaksi. Menurutnya, sejumlah event sebelumnya terbukti memberikan dampak langsung terhadap penjualan UMKM.

"Waktu Pawai Budaya itu lumayan ramai. Dagangan saya habis. Jadi memang harus ada kegiatan seperti itu biar dagangan benar-benar laku banyak," tuturnya.

Harapan serupa disampaikan seorang penunggu toko yang enggan disebutkan namanya. Ia mengatakan perbedaan jumlah pembeli cukup terasa antara hari biasa dengan akhir pekan.

"Memang ada perubahan antara hari Senin sampai Kamis dengan weekend. Kalau malam Minggu lumayan," katanya.

Dalam sehari, menurutnya, terdapat sekitar tujuh hingga sembilan pembeli yang melakukan transaksi. Sementara masyarakat yang datang hanya untuk bertanya atau melihat-lihat jumlahnya lebih banyak.

Meski keuntungan yang diperoleh belum besar, ia mengatakan usaha tersebut masih memungkinkan untuk dipertahankan. "Kalau rugi banget mungkin kami juga enggak dilanjutkan. Kami bertahan di sini karena memang ada untung, cuma enggak gede," katanya.

Sementara itu, pedagang jasuke dan es jeruk, Muhidin, justru menilai pembangunan Royal Baroe belum memberikan perubahan signifikan terhadap penjualannya. Menurutnya, jumlah masyarakat yang datang memang meningkat, khususnya pada Sabtu dan Minggu malam. Namun, kondisi tersebut belum otomatis meningkatkan transaksi secara signifikan.

"Kalau soal penjualan mungkin ada peningkatan sedikit. Setelah dibangun itu banyak orang datang, terutama *weekend*, Sabtu Minggu, terutama malam Minggu. Tapi kalau soal penjualan enggak signifikan, biasa-biasa saja," ungkap Muhidin.

Muhidin menjual dagangannya dengan harga sekitar Rp5.000. Ia berjualan secara keliling sehingga tidak terbebani biaya sewa lapak. "Saya menjual ini seharga Rp5.000. Perihal tempat saya

Wahyu Nurjamil

enggak bayar karena saya keliling," katanya.

Ia hanya mengeluarkan sekitar Rp5.000 untuk uang salaran pada malam Minggu. Menurutnya, kondisi tersebut cukup membantu karena biaya operasional yang harus ditanggung relatif kecil.

"Karena saya enggak bayar tempat di sini, alhamdulillah aja disyukuri," ujarnya.

Muhidin berharap ke depan terdapat pola pengelolaan kawasan yang mampu mengarahkan pengunjung agar tidak sekadar datang untuk melihat suasana atau berfoto, tetapi juga membeli produk UMKM.

"Semoga ke depannya makin ada alur untuk kami pedagang di sini, supaya masyarakat bukan hanya berkunjung, berfoto, melihat suasana Royal Baroe, tapi juga menikmati dagangan di sekitar kawasan ini," harapnya.

Di tengah persoalan keberlanjutan ekonomi UMKM di Royal Baroe, Pemerintah Kota Serang juga tengah menyiapkan optimalisasi aset eks Pasar Lama.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Ina Linawati, mengatakan aset eks Pasar Lama merupakan aset milik Pemkot Serang yang berasal dari pelimpahan aset Pemerintah Kabupaten Serang.

Sebelum menjadi aset Pemkot Serang, bangunan tersebut merupakan objek kerja sama antara Pemkab Serang dengan pihak ketiga.

"Saat ini aset tetap dikelola oleh Pemerintah Kota Serang melalui mekanisme pemanfaatan yang sesuai dengan ketentuan, termasuk sewa dan/atau retribusi pasar," ujar Ina kepada BANPOS, Minggu (6/9).

Ia menegaskan, aset eks Pasar Lama tidak dibiarkan begitu saja. Pemkot Serang terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah maupun masyarakat.

"Jadi, bukan berarti aset tersebut dibiarkan, tetapi Pemerintah Kota Serang terus melakukan upaya optimalisasi agar aset dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat," katanya.

Salah satu opsi yang kini dikaji yakni pemanfaatan aset tersebut sebagai kantong parkir. Pemkot Serang mempertimbangkan mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) untuk merealisasikan rencana tersebut.

Melalui skema BGS, pembangunan sarana dan prasarana dapat dilakukan oleh pihak ketiga sehingga kebutuhan pembiayaan pembangunan tidak seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ina menjelaskan, pihak ketiga yang menjadi mitra nantinya berkewajiban memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah selama masa perjanjian berlangsung. Besaran kontribusi tersebut akan disesuaikan dengan hasil perhitungan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Melalui skema ini, pembangunan sarana dilakukan oleh pihak ketiga sehingga tidak seluruh kebutuhan pembiayaannya dibebankan kepada APBD. Selama masa perjanjian, mitra berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai hasil perhitungan dan ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Menurut Ina, skema tersebut menjadi salah satu cara agar aset daerah tetap produktif tanpa harus sepenuhnya mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, sarana dan prasarana yang dibangun oleh pihak ketiga akan menjadi milik Pemkot Serang. "Setelah masa perjanjian berakhir, sarana dan prasarana yang dibangun tersebut akan menjadi milik Pemerintah Kota Serang," ujarnya.

Ia menilai penerapan skema tersebut dapat memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, aset daerah dapat dioptimalkan dan memberikan kontribusi terhadap daerah. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas parkir dapat dipenuhi tanpa memberikan tekanan pembiayaan yang terlalu besar terhadap APBD.

"Dengan demikian, aset tetap produktif, kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan beban APBD dapat ditekan," pungkas Ina.

Selain mengoptimalkan aset, Pemkot Serang juga tengah menyiapkan penataan kawasan perdagangan Pasar Lama. Kawasan tersebut direncanakan dikembangkan menjadi kawasan bisnis setelah para pedagang eksisting dipindahkan ke kawasan Kepandean.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkopukmperindag) Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengatakan perencanaan pemindahan pedagang Pasar Lama telah dimulai sejak tahun lalu.

"Bagaimana kita memindahkan para pedagang eksisting yang ada di Pasar Lama untuk dipindahkan ke Kepandean. Ini diawali supaya tidak terlalu banyak pasar di Kota Serang. Semua dijadikan satu, kita buatkan juga tempat yang representatif untuk para pedagang," kata Wahyu, Rabu (3/9).

Menurutnya, penataan tersebut berkaitan dengan rencana Walikota Serang menjadikan Pasar Lama sebagai kawasan bisnis. Karena itu, kawasan tersebut nantinya membutuhkan sejumlah fasilitas penunjang, salah satunya gedung parkir.

"Perencanaan dari Pak Wali untuk membuat Pasar Lama itu sebagai kawasan bisnis. Maka perlu ditunjang dengan kawasan parkir yang representatif," ujarnya.

Gedung parkir tersebut direncanakan memiliki tiga lantai dengan luas sekitar 3.000 meter persegi. Nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp18 miliar. Namun, Wahyu menegaskan pembangunan gedung parkir tersebut tidak menggunakan APBD Kota Serang. Pemkot akan menawarkan proyek tersebut kepada pihak ketiga melalui skema BGS.

"Anggarannya itu kurang lebih sekitar Rp18 miliaran. Tetapi ini tidak dibangun oleh APBD, tapi dikerjasamakan melalui penawaran kepada seluruh pihak yang memang nanti berminat mengikuti lelangnya dengan sistem BGS," jelasnya.

Hingga saat ini, PT Brata Wijaya Banten disebut menjadi pihak yang telah menyampaikan inisiatif gambar dan perencanaan pembangunan gedung parkir tersebut. Meski demikian, Wahyu menegaskan prosesnya tetap terbuka bagi pihak lain yang berminat. "Semua sebetulnya terbuka. Terbuka untuk umum, tetapi baru PT Brata yang mengajukan dengan inisiasi gambar dan perencanaan dari mereka," katanya.

Pemkot Serang juga belum dapat memastikan besaran keuntungan atau pendapatan yang nantinya diperoleh daerah dari kerja sama tersebut. Perhitungan masih harus melihat keseluruhan model bisnis, termasuk kemungkinan pemanfaatan ruang selain area parkir.

"Belum bisa dihitung. Nanti dilihat secara komprehensif dari pelaksana yang memang berminat untuk mengadakan gedung parkir di situ," ujarnya.

Selain sebagai fasilitas parkir, gedung tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk ruang iklan maupun kegiatan yang mendukung tugas pokok DinkopUKMPerindag.

Wahyu menyebut dalam skema BGS terdapat porsi 10 persen yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan oleh pelaku UMKM. "Setiap BGS itu ada 10 persen yang digunakan untuk tusi, artinya untuk memfasilitasi tugas pokok DinkopUKMPerindag. Bisa ditempati juga oleh para UMKM. Itu nanti harus dihitung," tuturnya.(CR02/ENK)

SAAT DEBU GAK 'MENYERBU'

GUNUNG Anak Krakatau (GAK) mengalami erupsi sejak Jumat (4/9) malam hingga Sabtu (5/9) pagi. Dampaknya terasa hingga ke sejumlah daerah, termasuk mempengaruhi kegiatan belajar mengajar.

Salah satu dampak yang langsung dirasakan Masyarakat akibat dari erupsi GAK adalah hujan abu vulkanik. Sejumlah warga yang berdomisili di selat sunda mengaku merasakan debu yang menyebabkan mata perih dan sesak nafas. Akibatnya, debu vulkanik itu mempengaruhi aktivitas sekolah warga.

Seorang warga bernama Sanan (24) dari Kampung Pasauran Satu, Desa Umbul Tanjung, Kecamatan Cinangka mengatakan paparan abu vulkanik mulai dirasakan menebal di sekitar permukiman warga sejak pukul 17.00 WIB. Dirinya yang mengendarai motor merasakan mata sakit saat tidak menggunakan helm.

"Ke badan juga menempel debunya, membuat tidak nyaman. Bahkan di depan rumah saya sudah banyak debu yang menempel di lantai," katanya.

Sanan menambahkan, rentetan suara gemuruh dan getaran yang tidak kunjung berhenti sejak Jumat (4/9) malam mendorongnya berinisiatif mendatangi langsung Pos Pemantau Gunung Api (PGA) Anak Krakatau di Pasauran. Dirinya berusaha memastikan kondisi keamanan gunung tersebut.

Kekhawatiran serupa turut dirasakan oleh Kepala SDN Pasir Menteng, Kecamatan Cinangka, Ajat Sudrajat. Ajat sengaja mendatangi Pos PGA Anak Krakatau malam itu untuk memastikan secara langsung status dan kondisi gunung, guna mendapatkan informasi valid yang nantinya akan disampaikan kepada para siswa dan wali murid di sekolah.

Ajat membenarkan bahwa sebaran debu vulkanik tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan kesehatan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan.

"Di perjalanan, kalau keadaan tidak memakai masker itu sudah lumayan sakit ke tenggorokan, kemudian mata juga perih kalau tidak pakai kacamata. Walaupun kita tidak terlihat jelas di udara, tapi debu-debunya di pos pemantauan Krakatau ini kelihatan menumpuk," ujarnya.

Informasi langsung dari pos pemantau dirasa sangat penting oleh Ajat, mengingat aktivitas erupsi tersebut telah memicu kecemasan di tengah masyarakat dan berdampak pada sepinya kehadiran siswa di sekolah.

Lebih lanjut, Ajat menuturkan bahwa getaran dan dentuman erupsi ini sebenarnya dianggap sebagai fenomena biasa oleh sebagian besar warga Pasauran. Namun ada sebagian warga yang berinisiatif untuk mengamankan diri.

"Masyarakat itu masih amanaman saja karena hal-hal ini sudah biasa dan alami di warga Pasauran. Tetapi memang ada beberapa warga yang berinisiatif mengamankan dirinya sendiri ke daerah pegunungan," katanya.

Bukan hanya warga yang berada di pesisir Selat Sunda, sejumlah warga di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak terindikasi terdampak oleh letusan GAK di akhir pekan kemarin. Rumah mereka dihiasi debu hitam.

Martina (28) menjadi salah satu warga di Kecamatan Rangkasbitung yang rumahnya terdampak paparan debu tersebut. Dia mengaku baru mengetahui adanya debu tersebut di rumahnya sekitar pukul 05.00 WIB pagi.

"Saya nggak bakal ngira kalau debunya sampai sini. Baru tahu banyak debu itu pas habis subuh sekitar jam 05.00 WIB pagi," katanya kepada BANPOS, Minggu (6/9).

Martina menduga debu tersebut berasal dari GAK. Sebab, berdasarkan informasi yang diperolehnya gunung berapi tersebut kini tengah aktif dan dalam status siaga.

"Kalau lihat di medsos kan sekarang lagi aktif tuh Gunung Krakatau. Ngiranya sih pasti dari situ kebawa angin," ujarnya.

Debu vulkanik yang menempel di terasnya tampak pekat. Padahal, jika dilihat dari Google Maps, jarak antara GAK dengan rumahnya di Kecamatan Rangkasbitung terbilang cukup jauh yakni sekitar 97,5 km

Martina mengaku, sudah tiga kali membersihkan terasnya dari paparan debu vulkanik sejak pukul 05.00 WIB hingga 10.00 WIB. "Sama ini sudah ketiga kalinya," ujarnya.

Hal yang sama juga turut dialami tetangganya, Maryati (45). Dia pun baru menyadari ada paparan debu di rumahnya pada dini hari sekitar pukul 05.00 WIB. Maryati berharap kondisi yang saat ini terjadi dapat segera pulih dan masyarakat dapat beraktivitas normal tanpa adanya gangguan dari dampak yang ditimbulkan akibat debu. "Pengennya mah sih semuanya normal nggak terjadi apa-apa," harapannya.

Foto Erupsi Menerus dari Gunung Anak Krakatau (GAK) yang diambil pada Sabtu Malam, (5/9).

Terpisah, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) mengalihkan sementara kegiatan pembelajaran di seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar dari Rumah (BDR). Kebijakan tersebut diberlakukan selama satu hari, yakni Senin, 7 September 2026, sebagai langkah kesiapsiagaan menyusul peningkatan aktivitas vulkanik GAK di Selat Sunda.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai Langkah Kesiapsiagaan Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Serang. Dalam surat edaran tersebut disebutkan, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih berlangsung dengan status Level III atau Siaga per Minggu, 6 September 2026.

"Demikian demi menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik serta warga sekolah," ucap Nuri yang tercantum dalam surat edaran yang diterima BANPOS, Minggu (6/9).

Dindikbud Kota Serang juga menyatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang.

Pada bagian lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus memantau aktivitas GAK yang belakangan cenderung meningkat. Pemantauan dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kecamatan, hingga kelurahan untuk memastikan kondisi di lapangan.

Walikota Cilegon, Robinsar, mengatakan, berdasarkan laporan sementara dari jajaran pemerintahan di wilayah pesisir, kondisi perairan di sekitar Cilegon, khususnya Merak dan Ciwandan, masih dalam kondisi normal.

"Aktivitas dari Anak Gunung Krakatau yang hari ini ramai dibicarakan, tim kami baik dari BPBD maupun unsur pemerintahan setempat, kecamatan dan kelurahan terus melakukan monitoring memastikan yang sebenarnya di lapangan," kata Robinsar, Minggu (6/9).

Walikota Cilegon pastikan terus monitoring aktivitas anak gunung krakatau, Minggu (6/9)

Ia menyebutkan, hasil pemantauan dan laporan dari Camat Pulomerak serta Camat Ciwandan menunjukkan kondisi air laut masih normal. Aktivitas masyarakat maupun kegiatan pelayaran juga masih berlangsung seperti biasa.

"Alhamdulillah dari laporan Camat Pulomerak dan Camat Ciwandan memastikan bahwa kondisi air laut masih normal dan aktivitas juga masih berjalan seperti biasa," ujarnya.

Sementara itu, Camat Ciwandan Agus Ariyadi mengatakan, pihaknya melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi perairan di wilayah Pelabuhan Pelindo II Ciwandan.

"Malam ini sedang di Pelabuhan Pelindo 2, sedang melihat, meng-*crosscheck* kondisi air laut. Berdasarkan laporan dari petugas, semalam kondisi laut relatif normal," tutur Agus.

Hal senada disampaikan Camat Pulomerak Adhe Heru Sanjaya. Ia memastikan kondisi perairan Selat Sunda, khususnya wilayah Merak, masih relatif aman.

"Bahwa perairan Selat Sunda yang khusus di Merak masih relatif aman. Ini dibuktikan dengan masih beraktivitasnya pelayaran di Merak selama 24 jam," pungkasnya.

Meski demikian, Pemkot Cilegon memastikan pemantauan terhadap aktivitas Anak Gunung Krakatau tetap dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi sekaligus memastikan informasi yang diterima masyarakat sesuai dengan situasi terkini di lapangan.

Terpisah, Pemprov Banten terus memantau perkembangan aktivitas GAK yang saat ini berstatus Level III (Siaga). Aktivitas erupsi yang berlangsung menyebabkan sebaran abu vulkanik terbawa angin hingga ke sejumlah wilayah Banten dan Jawa Barat.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Pemprov Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak pemantau gunung api di Bandung terkait perkembangan aktivitas Anak Krakatau dan arah sebaran abu vulkanik.

"Ya, kita tetap monitor. Melalui BPBD, BPBD koordinasi dengan pemantau yang ada di Bandung," ujar Andra, Sabtu (5/9).

Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan, arah angin membawa abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau menuju wilayah Banten dan Jawa Barat. Pemerintah daerah terus memantau kondisi tersebut untuk memastikan langkah mitigasi dapat dilakukan secara tepat.

"Arah anginnya membawa debunya sampai ke wilayah Banten dan Jawa Barat," katanya.

Andra mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik, namun meningkatkan kewaspadaan, khususnya masyarakat yang berada di wilayah yang terdampak sebaran abu vulkanik.

"Kita berdoa semoga semua baik-baik saja," ucapnya.

Gubernur juga meminta masyarakat mematuhi rekomendasi keselamatan yang dikeluarkan Badan Geologi. Masyarakat, wisatawan maupun nelayan dilarang mendekati dan melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

"Masyarakat diminta untuk menjauh dari radius yang dianjurkan, tiga kilometer dari lokasi," tegas Andra.

Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial dan memastikan informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau diperoleh dari sumber resmi.

"Diharapkan untuk mendapatkan informasi dari media resmi atau dari sumber yang resmi," ujarnya.

Berdasarkan laporan terbaru Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 5 September 2026, Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III (Siaga). Aktivitas erupsi menerus terpantau disertai lontaran material vulkanik, lava fountain, suara gemuruh dan hujan abu.

Dalam rekomendasinya, Badan Geologi meminta masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau serta pengunjung, wisatawan dan nelayan tidak memasuki wilayah dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lontaran batu pijar, lava, awan panas dan hujan abu lebat.

Sementara masyarakat di wilayah pantai Banten dan Lampung diminta tetap tenang serta mengikuti arahan BPBD setempat. Badan Geologi juga menegaskan masyarakat agar tidak mempercayai isu yang tidak bersumber dari kanal resmi terkait aktivitas Anak Krakatau.

Seiring adanya sebaran abu vulkanik, Andra Soni juga meminta masyarakat di wilayah yang terdampak untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.

"Karena ada abu, daerah yang terdampak dimohon untuk kalau keluar rumah menggunakan masker untuk menjaga," katanya.

Pemprov Banten melalui BPBD akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan bersama instansi terkait. Masyarakat diminta tetap tenang, tidak mendekati kawasan berbahaya dan mengikuti setiap perkembangan serta rekomendasi resmi dari Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) BPBD.

Andra menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah di tengah meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau.

"Kita berdoa semoga semua baik-baik saja," tandasnya.(CR02/CR03/MPD/TQS/ENK)

Carita Tetap Ramai di Tengah Isu Erupsi

GUNUNG Anak Krakatau (GAK) mengalami erupsi sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi, aktivitas wisatawan di kawasan Pantai Carita , Kabupaten Pandeglang, masih terlihat ramai wisatawan lokal maupun luar daerah berdatangan ke Pantai Carita. Meskipun GAK mengalami erupsi, kondisi tersebut tidak menyurutkan minat wisatawan untuk berlibur ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang.

Terlihat Pantai Carita , masih dipadati wisatawan anak-anak hingga orang dewasa tampak bermain air laut di Pantai Pasir Putih Carita. Sejumlah wisatawan mengaku sengaja datang ke Pantai Carita untuk mengisi libur akhir pekan bersama sanak keluarga. Meskipun merasa khawatir dengan aktivitas GAK. Namun para wisatawan merasa aman, karena hingga saat ini kondisi di kawasan wisata masih aman dan tidak ada hal yang mengganggu aktivitas wisata.

"Kita sengaja datang ke Pantai Carita untuk mengisi libur akhir pekan bersama keluarga," kata Abdul Mutholib, salah seorang wisatawan asal Jakarta, Minggu (6/9).

"Meskipun khawatir karena erupsi gunung anak Krakatau, Alhamdulillah kondisinya masih aman," sambungnya.

Hal senada disampaikan Muslim, wisatawan alas Tangerang, ia bersama datang ke Pantai Carita bersama keluarganya untuk liburan akhir pekan.

"Sejauh ini kondisinya amanaman saja, mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," ucapnya.

Terpisah, Pengelola Pantai Pasir Putih, Hilma Fajarwati mengatakan, untuk memberikan keamanan bagi para pengunjung. Pihaknya meningkatkan kesiap Siagaan disekitar objek wisata.

"Untuk memberikan rasa aman bagi pengunjung, kita telah meningkatkan kesiap Siagaan disekitar objek wisata," katanya.

Di wilayah lain, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang, Diat Hermawan, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan aktivitas GAK dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi dampak abu vulkanik.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD karena bersamaan dengan penanganan dampak kekeringan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.

"Memang sekarang ini konsentrasi BPBD bertambah, dari yang sedang menangani kekeringan ditambah dampak erupsi Gunung Anak Krakatau" kata Diat kepada BANPOS, Minggu (6/9).

Untuk mengantisipasi keresahan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan warga, BPBD Kota Serang telah menyebarkan imbauan melalui media sosial dan flyer. Edukasi tersebut berisi langkah yang perlu dilakukan masyarakat apabila terjadi paparan abu vulkanik.

Diat menegaskan, hingga saat ini BPBD belum menerima laporan khusus dari wilayah di Kota Serang terkait dampak langsung abu vulkanik.

"Kalau laporan secara khusus belum ada. Dampaknya memang merata, bahkan mungkin se-Banten. Untuk Kota Serang belum ada laporan khusus," ujarnya.

Meski belum terdapat dampak signifikan, BPBD tetap meminta masyarakat tidak menganggap remeh sebaran abu vulkanik. Sebab, paparan abu dapat mengganggu kesehatan, khususnya saluran pernapasan dan mata.

Diketahui, Sabtu (5/9) dini hari erupsi GAK kembali terjadi letusan disertai semburan material vulkanik terlihat membumbung tinggi saat terekam kamera salah seorang nelayan. Dentuman akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut terasa hingga Kecamatan Labuan dan Kecamatan Carita.(DHE/ENK)

Garuda Muda Berjaya

Lolos Piala Asia U20

LAOS, BANPOS - Timnas U20 Indonesia resmi memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2027. Pencapaian ini diraih usai pasukan muda menumbangkan timnas U20 Australia. Kemenangan dramatis tersebut terjadi di Lao National Stadium KM16 pada hari Minggu.

Pasukan asuhan pelatih Nova Arianto sukses mengakhiri babak kualifikasi Grup H melalui keunggulan skor 2-0. Hasil tersebut membuat skuad kebanggaan bangsa mendapatkan tiket sebagai juara grup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir segera memberikan apresiasinya.

"Saya percaya dengan potensi tim ini dan saya yakin masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan generasi ini," ujar Erick.

Kemenangan krusial atas negara Australia tersebut dianggap sebagai sebuah bukti nyata perkembangan timnas. Garuda Muda kini memiliki keberanian untuk menantang salah satu raksasa sepak bola Asia. Sang lawan sejatinya berstatus sebagai juara bertahan turnamen bergengsi ini.

Indonesia mampu menyelesaikan seluruh rangkaian babak kualifikasi pada posisi puncak klasemen. Mereka sukses mengoleksi tujuh poin hasil dari dua kemenangan serta satu kali hasil imbang. Skuad muda juga berhasil mencetak lima gol tanpa pernah kebobolan sama sekali.

"Tiket ke Piala Asia sudah kita dapatkan, sekarang tugas kita adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi level persaingan yang lebih tinggi," kata Erick.

Perjalanan panjang menuju kesuksesan kualifikasi ini diawali oleh gol pembuka Theodore Evan Leeming. Sang pemain itu sukses memperdaya kiper Robert James Almeida Cook pada menit ke-28. Ia mencungkil bola dengan sangat tenang sebelum menanduknya memasuki jala gawang.

Pertahanan rapat dan solid membuat Australia kesulitan menciptakan peluang pada sisa babak kedua. Indonesia lantas memanfaatkan strategi serangan balik cepat saat lawan terlalu fokus menyerang. Amar Rayhan Brkic akhirnya menyegel kemenangan krusial melalui tendangan gol penutup laga.

"Manfaatkan setiap waktu yang ada," ucap Erick.

Turnamen level benua tersebut rencananya akan diselenggarakan di negara China pada awal bulan Maret. Ajang akbar Asia ini menjadi jalur utama bagi seluruh tim untuk berebut tiket global. Empat tim semifinalis kelak berhak melaju menuju Piala Dunia U20 edisi 2027.

Kejuaraan dunia usia muda itu nantinya bakal diselenggarakan di Azerbaijan dan Uzbekistan. Kesempatan emas ini wajib dipersiapkan secara sangat matang oleh seluruh komponen timnas. Kualitas permainan hingga taktik strategi regu mutlak harus terus ditingkatkan secara intensif.

"Jangan cepat puas," ujar Erick Thohir. (ANT/AZM)

ISTIMEWA

Kiandra Ramadhipa Cemerlang di Sirkuit Valencia

JAKARTA, BANPOS - Pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadhipa tampil perkasa di perhelatan Moto3 Junior 2026. Ia sukses menempati posisi keenam balapan kedua di Sirkuit Ricardo Tomo, Valencia, pada hari Minggu.

Pembalap Honda Asia-Dream Racing Junior Team ini tampil apik sejak awal dari grid kedua belas. Ramadhipa langsung bermanuver tajam merangsek menuju urutan kesebelas ketika balapan baru memasuki putaran pertama. Saat tersisa tiga belas lap, ia sukses menembus posisi kedelapan usai menyalip tiga pembalap sekaligus.

Tren memukau terus dipertahankan pembalap tangguh tersebut pada pertengahan sesi adu kecepatan di lintasan bergengsi. Ia sukses menempati urutan ketujuh pada putaran ketujuh lalu naik peringkat keenam pada lap kedelapan. Walau sempat terlempar ke posisi sembilan pada sisa lima lap, ia berhasil finis di posisi enam.

Catatan waktu balapan Ramadhipa hanya terpaut tipis 0,485 detik dari Carlos Cano asal CFMoto Aspar Junior Team. Carlos sukses menyabet posisi pertama balapan kedua lewat torehan waktu 26 menit 37,141 detik. Posisi kedua dikunci oleh pembalap Kyrgyzstan Yaroslav Karpushin dengan selisih waktu 0,111 detik dari sang pemenang.

Urutan ketiga pada balapan pamungkas diisi secara mantap oleh pembalap berbakat Spanyol bernama Fernando Bujosa. Tambahan sepuluh poin krusial dari balapan kedua ini sangat berharga bagi posisi klasemen Ramadhipa. Sang pembalap tangguh berhasil mengamankan peringkat kelima klasemen sementara dengan raihan total delapan puluh poin.

Pada sesi balapan pertama ia merangsek urutan kesebelas saat balapan menyisakan tiga belas putaran. Saat tersisa sembilan lap, posisi kesepuluh diamankan usai menyalip pembalap Momoven Racing Italia Leanoardo Zanni. Balapan tersebut akhirnya kembali dijuarai Carlos Cano lewat rekor kecepatan mumpuni 26 menit 28,689 detik.

Pembalap Yaroslav berhasil finis posisi kedua pada balapan pembuka usai terpaut catatan waktu 0,214 detik. Urutan ketiga sukses direbut secara apik oleh atlet andalan Spanyol David Gonzalez. Pembalap hebat tanah air Ramadhipa telah resmi memanen tambahan enam poin dari hasil balapan pembuka turnamen tingkat dunia ini. (ANT/AZM)

Atlet Panjat Tebing Rebut Medali Perunggu

JAKARTA, BANPOS - Atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadani meraih prestasi dunia. Pria tangguh ini sukses merebut medali perunggu pada kejuaraan internasional. Turnamen World Climbing Series Koper 2026 tersebut diselenggarakan di negara Slovenia.

Pemuda yang disapa Srondeng ini sukses mengamankan posisi ketiga turnamen. Ia mencatatkan skor hebat yakni 28+ pada babak final hari Minggu. Kategori yang dipertandingkan dalam seri bergengsi ini hanyalah disiplin nomor lead.

Medali emas berhasil direbut secara mutlak oleh atlet tangguh asal Jepang. Neo Suzuki tampil sebagai peraih nilai tertinggi dengan skor mencapai 33+. Medali perak sukses diraih Satone Yoshida melalui torehan skor akhir 30+.

Hasil impresif ini tunjukkan kemampuan Srondeng dalam menjaga performa fisiknya. Ia mencatatkan skor 5,1 dan menduduki posisi ketujuh saat babak kualifikasi. Atlet berumur 20 tahun tersebut selanjutnya mampu menempati posisi kelima semifinal.

Pemanjat tebing andalan bangsa ini raih nilai 33 pada babak semifinal. Skor apik tersebut mengantarkannya melaju mulus menuju babak akhir yang ketat. Fase puncak itu didominasi atlet asal Jepang, Italia, beserta Korea Selatan.

Srondeng mampu lewati tantangan jalur tebing dengan sangat tenang dan fokus. Namun ia belum mampu menyamai pencapaian impresif Suzuki beserta rekan senegaranya. Torehan medali perunggu di Koper ini tetap menjadi sebuah pencapaian krusial.

Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia memang telah memasang target khusus. Organisasi tersebut berharap para atlet berikan performa terbaik di perlombaan. Mereka ditargetkan mampu melanjutkan laju perjuangan keras hingga menembus babak final.

Keterlibatan pada turnamen ini merupakan momentum untuk tingkatkan peringkat dunia atlet. Ajang ini berfungsi menguji kesiapan menuju Asian Games 2026. Pesta olahraga itu akan berlangsung di Aichi-Nagoya Jepang pada bulan September. Turnamen olahraga akbar kawasan Asia ini akan dibuka pada 19 September. Seluruh rangkaian pertandingan dijadwalkan akan bergulir hingga 4 Oktober. Pengalaman ajang dunia ini sangat krusial bagi persiapan mental semua atlet. (ANT/AZM)

Aldila Sutjiadi Menangi Duel Sesama Warga Negara

ISTIMEWA

NEWYORK, BANPOS - Petenis kebanggaan Indonesia Aldila Sutjiadi bersama pasangan gandanya Erin Routliffe memenangi pertarungan epik sesama warga senegara. Mereka sukses menundukkan pasangan Janice Tjen dan Leylah Fernandez melalui pertandingan dua set 6-4, 6-4.

Pertarungan prestisius Grand Slam tersebut dilaksanakan langsung di Court 17, New York, Amerika Serikat. Pasangan unggulan kesembilan itu akhirnya berhak menggenggam selembar tiket babak 16 besar turnamen US Open 2026. Laga tersebut resmi berakhir manis pada hari Sabtu setelah bergulir selama sembilan puluh satu menit.

"Tentunya saya sangat bangga dengan momen ini karena hal ini tidak sering terjadi," kata Aldila Sutjiadi seusai pertandingan.

Duel sengit langsung mewarnai jalannya set pertama dengan taktik adu servis keras mendominasi lapangan. Aldila beserta Erin terbukti jauh lebih efektif dalam mengeksekusi peluang break point. Mereka berhasil menyambar tiga konversi dari lima buah peluang break point berharga demi mengamankan set pembuka.

Bermodalkan tekad kuat pada set kedua, pasangan Aldila beserta Erin kembali mempertahankan tekanan bola secara spartan. Dua momen emas break kembali mereka sarangkan secara apik menuju jantung pertahanan. Duet Tjen bersama Fernandez terpaksa mengubur mimpinya memenangi perhelatan Grand Slam tersebut karena kembali kalah.

"Dan, saya sangat senang bermain melawan Janice, tapi saya berharap kita ketemunya mungkin di semifinal atau final," ujar Aldila.

Pasangan tersebut kini menatap tantangan selanjutnya pada babak perdelapan final melawan Anna Bondar beserta Anhelina Kalinina. Ganda lawan tersebut sebelumnya sukses menghempaskan pasangan unggulan Maja Chwalinska beserta Magda Linette. Skor tiga set keras 3-6, 6-3, 6-3 mewarnai kemenangan krusial mereka.

Pada kompetisi kategori nomor tunggal putri, petenis kenamaan Iga Swiatek sukses merengkuh tiket perdelapan final. Petenis tangguh ini menekuk unggulan ke-25 Marie Bouzkova 7-6(3), 7-6(3) melalui pertarungan keras memakan waktu selama ratusan menit.

"Pertandingan ini cukup menguras fisik," kata Iga Swiatek merespons laju menawannya tersebut.

Tunggal putri Coco Gauff juga memastikan langkahnya usai melumat Cristina Bucsa 6-3, 6-4 di arena Arthur Ashe Stadium. Sempat kehilangan gim awal karena tertinggal satu berbanding tiga pada awal pertandingan. Unggulan keempat itu lantas merespons dan mempercepat tempo serangannya. "Berbeda sekali bermain pada siang hari dibandingkan malam," ujar Gauff menanggapi kendala lapangan.

Sementara itu Naomi Osaka juga maju melenggang babak enam belas besar setelah kalahkan Elise Mertens 6-3, 3-6, 7-5. Petenis veteran Filipina Alexandra Eala terpaksa menelan pil pahit kekalahan karena dihabisi petenis Iva Jovic 5-7, 6-3, 5-7. (ANT/AZM)

Banyak Siswa Keracunan MBG

Wamenkes: Belum Masuk Status KLB

JAKARTA, BANPOS - Sepekan terakhir, kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Jumlah siswa yang keracunan hampir 2.000 orang. Dimintai tanggapan mengenai ini, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyatakan, keracunan MBG belum masuk Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dante memastikan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengevaluasi kondisi klinis dan memprioritaskan pertolongan pada korban keracunan MBG. Pihaknya pun akan mengajak Badan Gizi Nasional (BGN) turun ke lapangan.

"Nanti investigasinya dilakukan bersama oleh Kementerian Kesehatan dan BGN. Secepatnya kita akan lakukan," kata Dante, kepada wartawan, di RS Soeharto Heerdjan, Jakarta Barat, Jumat (4/9/2026).

Investigasi yang dilakukan bisa melalui sejumlah instrumen. Misalnya, akan ada indikator yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam kasus tersebut. Kemudian Kemenkes akan memberi masukan pada BGN.

Mengenai kasus keracunan yang terjadi, Dante menyatakan, belum masuk kategori KLB. "Kalau KLB nggak mungkin. KLB itu kan mesti populasi umum. Ini kejadian khusus yang harus dievaluasi, itu saya setuju," ulas mantan Tim Dokter Kepresidenan RI ini.

Dante menjelaskan, penerima manfaat Program MBG hanya mencakup sebagian populasi. Dengan tolok ukur seperti ini, kasus yang terjadi pada kelompok tersebut tidak dapat disebut sebagai KLB.

"Jadi, jangan jadikan kejadian luar biasa. Kalau kejadian luar biasa itu menyangkut semua populasi. Ini kan populasi hanya sebagian yang diberikan makanan tambahan," terangnya.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1501 Tahun 2010, terdapat enam syarat sejumlah kejadian dapat dianggap KLB. Pertama, timbulnya penyakit menular baru. Kedua, kenaikan jumlah penderita selama periode waktu berturut-turut. Ketiga, kenaikan jumlah penderita mencapai dua kali lipat atau lebih dibanding periode sebelumnya. Keempat, kenaikan rata-rata tahunan penderita per bulan hingga dua kali lipat atau lebih. Kelima, peningkatan Case Fatality Rate (CFR) atau angka kematian dalam kurun waktu tertentu sebesar 50 persen atau lebih. Keenam, peningkatan proportional rate dari penderita baru mencapai dua kali lipat atau lebih.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago sepakat dengan penilaian Wamenkes. Menurutnya, kejadian keracunan terhadap penerima manfaat MBG bukan KLB. "Karena bukan wabah, maka tidak disebut Kejadian Luar Biasa," katanya saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (4/9/2026) malam.

Untuk mengatasi kasus ini, kata Irma, yang bisa dilakukan adalah memberikan sanksi tegas agar pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertanggung jawab. "Bukan hanya di-suspend, tapi juga membiayai seluruh biaya pengobatan, agar menjadi efek jera bagi SPPG. Agar selanjutnya mereka lebih berhati-hati dalam melayani penerima manfaat," saran Irma.

Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh. Tidak hanya terhadap dapur dan prosedur operasional, tetapi juga terhadap rantai pengawasan hingga pihak yang bertanggung jawab langsung di setiap SPPG.

Tamsil juga berencana meminta penjelasan dari BGN melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Menurutnya, forum tersebut diperlukan untuk mengetahui akar persoalan sekaligus memastikan langkah korektif BGN tidak berhenti pada penanganan setelah kasus terjadi.

"Kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sistem pengawasannya berjalan. Kejadian seperti ini tidak boleh terus berulang," tegas Tamsil, di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, evaluasi terhadap kasus keracunan tidak hanya dibebankan kepada mitra atau dapur secara keseluruhan. BGN juga perlu melihat orang yang diberi tanggung jawab mengelola SPPG telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Tamsil memandang, ketegasan terhadap penanggung jawab diperlukan agar penghentian sementara operasional SPPG tidak menjadi satu-satunya jawaban setiap kali persoalan terjadi. Pasalnya, penghentian operasional juga dapat berdampak kepada penerima manfaat dan mitra yang menjalankan kewajibannya dengan baik. (AZM/RMID)

Wamenhaj Desak Revitalisasi Peran Utama Lembaga KBIHU

YOGYAKARTA, BANPOS - Pemerintah mulai menyoroti urgensi kebijakan tentang revitalisasi peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah di tingkat nasional. Langkah perbaikan ini ditujukan guna memperkuat perlindungan keamanan para jemaah dari incaran sindikat penipuan travel.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memaparkan instruksi krusial tersebut secara terbuka. Sosok pejabat tinggi kementerian berdialog dengan forum penyelenggara ibadah di kawasan Yogyakarta pada hari Minggu 6 September 2026.

"KBIHU harus direvitalisasi sebagai kelompok yang memang melakukan bimbingan terhadap jemaah haji, bukan kemudian mengkomodifikasi jemaah," tegas Dahnil.

Pemerintah pusat ternyata masih sering menerima pengaduan warga perihal operasional biro perjalanan yang berani melanggar aturan negara. Banyak calon jemaah haji dan umrah akhirnya telantar parah karena menjadi korban praktik kotor oknum agen tersebut.

Dahnil mengingatkan para pengelola biro perjalanan agar mereka senantiasa disiplin memprioritaskan standar keamanan perlindungan jemaah. Lembaga KBIHU dituntut kembali berorientasi penuh pada layanan pembinaan tanpa menjadikan para warga sebagai komoditas industri belaka.

"Pengaduan terkait travel yang bandel, nakal, dan melakukan penipuan masih cukup tinggi," ucapnya menyesalkan kasus itu.

Tata kelola penyelenggaraan perjalanan ibadah di wilayah otonom Yogyakarta hari itu berhasil memanen apresiasi dari kementerian terkait. Rasio laporan kasus penipuan atau wujud pelanggaran terhadap tamu Tuhan di sana dinilai rendah.

Pemerintah menaruh segenap harapan agar iklim perlindungan sangat kondusif ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan secara kolektif. Pemangku kepentingan wajib berkolaborasi erat demi pastikan jamaah terima kelayakan fasilitas pembinaan terbaik.

"Kita berharap praktik-praktik penipuan maupun pelanggaran terhadap jemaah semakin berkurang," pungkasnya di akhir diskusi. (ANT/AZM)

Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Jangan Pernah Bebani Masyarakat

BEKASI, BANPOS - Optimalisasi skema peningkatan pendapatan asli daerah sama sekali tidak boleh ditempuh lewat instrumen kenaikan tarif pajak yang berpotensi membebani masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan instruksi tersebut pada forum koordinasi pimpinan daerah. Pertemuan strategis mengenai kewenangan implementasi pengaturan kebijakan retribusi bagi jajaran pejabat pemerintahan daerah ini dilangsungkan di kawasan Kota Bekasi pada hari Jumat.

ISTIMEWA

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto

Segenap perangkat pemerintahan daerah secara resmi diimbau untuk senantiasa memperhatikan rancangan strategi perluasan basis wajib pajak secara progresif dan berkesinambungan. Bima secara tegas menginstruksikan para pemangku otoritas kebijakan agar segera mengoptimalkan utilitas pemanfaatan perangkat teknologi canggih beserta jaringan sistem integrasi pangkalan data. Langkah strategis semacam ini diyakini amat diperlukan demi menekan persentase kebocoran penerimaan kas secara sangat signifikan.

"Ekstensifikasi tanpa membebani masyarakat, jadi pada perluasan basis pajak, pada upgrading teknologi, bukan sekadar menaikkan tarif dan membebani warga," kata Bima.

Kebutuhan mendasar terhadap penguatan kapasitas pengelolaan keuangan pada tingkatan pemerintahan daerah saat ini diakui secara luas menjadi sebuah urgensi mendesak. Berdasarkan rincian pemaparan kelengkapan data kementerian tersebut, tercatat sekitar 86 persen pemerintah daerah di Indonesia berkapasitas fiskal amat rentan. Mereka semua hingga detik momentum ini terbukti masih amat bergantung secara masif pada kucuran dana transfer reguler yang disalurkan oleh pemerintah pusat.

Fenomena problematika ketergantungan kas tersebut terbukti jauh lebih dominan membelenggu sistem administrasi pada tataran manajemen pemerintahan tingkat kabupaten di penjuru wilayah. Fakta akurat di lapangan membeberkan indikasi kuat bahwa 96 persen struktur birokrasi pemerintahan kabupaten saat ini sungguh terpuruk dalam tingkatan kapasitas fiskal yang amat rentan. Sang pejabat kementerian menyarankan implementasi perumusan kolaborasi kebijakan sektoral dengan melibatkan langsung pemangku kepentingan.

"Saran saya ya lakukan co-creation, sekali lagi co-creation not collaboration, karena co-creation itu duduk sama-sama untuk mencari data-data yang lebih valid," tuturnya. (ANT/AZM)

Siagakan Bandara Kertajati, Tangani Efek Erupsi Krakatau

MAJALENGKA, BANPOS - Bandara Kertajati mulai disiagakan menampung lonjakan pengalihan rute penerbangan nasional. Antisipasi ini diambil menyusul adanya erupsi dahsyat Gunung Anak Krakatau.

Abu vulkanik memaksa pemerintah menutup sementara operasional Bandara Soekarno-Hatta. Penutupan objek vital tersebut diberlakukan ketat hingga pukul 17.30 WIB. Keputusan ini dieksekusi demi menjamin keamanan maskapai udara.

"Beberapa penerbangan menuju Jakarta terutama maskapai Garuda ada yang dialihkan untuk mendarat di Bandara Kertajati, Jawa Barat. Untuk selanjutnya disiapkan layanan bus dan Whoosh dari Kertajati menuju Jakarta," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pemerintah berupaya menyediakan angkutan publik tambahan. PT Kereta Api Indonesia menambah armada perjalanannya menuju ibu kota. Kereta tambahan berangkat dari Surabaya, Malang, Semarang dan Yogyakarta.

Penutupan turut mendera enam bandar udara lain. Bandara Radin Inten hingga Husein Sastranegara lumpuh oleh abu vulkanik. Executive General Manager BIJB Kertajati Nuril Huda membenarkan situasi gawat itu.

"Beberapa hari yang lalu ada erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan abu vulkaniknya keluar dan mengakibatkan Bandara Soekarno-Hatta terkena imbas," sebut Nuril.

Pengelola bandara tersebut segera melakukan persiapan. Antisipasi ini dieksekusi usai terbitnya larangan terbang menuju ibu kota. Seluruh fasilitas dicek ulang teknisi andal.

Petugas melaksanakan uji sampel debu pada landasan pacu. Pengujian ketat serupa turut menyasar kawasan apron. Langkah ini ditempuh guna memastikan sterilitas area penerbangan penerima.

"Tes terkait abu yang ada di runway, di apron, kemudian juga di titik-titik yang ditentukan untuk memastikan bahwa itu bukan abu vulkanik," ungkap Nuril.

Hasil pengujian membuktikan bahwa Kertajati bebas abu. Kondisi udara dinilai amat aman bagi pendaratan pesawat. Kesiapan ini sukses memfasilitasi dua jadwal maskapai Garuda Indonesia.

Penerbangan GA 961 asal Madinah tiba pukul 14.25 WIB. Pesawat tersebut mengangkut rombongan jemaah umrah berjumlah 356 penumpang. Armada rute Jeddah membawa sedikitnya 307 orang penumpang.

"Pada prinsipnya kita siap untuk melayani alternatif dari Cengkareng," tegas Nuril.

Pengalihan jalur ditempuh usai konsultasi bersama kementerian perhubungan. Dua pesawat asal timur tengah tertahan di udara. Keduanya telah mengudara sembilan jam sebelum penutupan bandara diumumkan.

Cuaca ekstrem membuat pengalihan trayek urung bisa dipastikan akhirannya. Otoritas bandara menyiagakan pos pelayanan secara optimal. Perlindungan warga kita dari polusi debu vulkanik terus dikampanyekan secara merata. "Kalau memang diperlukan domestik, kita juga siap," pungkas Nuril. (ANT/AZM)

PEMAGANGAN GRATIS KE JEPANG SEPI PEMINAT

Program Kemenaker RI untuk Provinsi Banten

SERANG, BANPOS - Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang Ady Nugroho mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI telah mengalokasikan anggaran dan kuota program pelatihan hingga pemagangan ke luar negeri dalam jumlah besar untuk Pro-vinsi Banten.

Kendati demikian, tingkat partisipasi masyarakat lokal untuk memanfaatkan peluang tersebut dinilai masih sangat rendah, salah satunya pada program pemagangan ke luar negeri dengan tujuan ke Jepang.

Padahal, kata dia, program pemagangan ke negeri sakura tersebut disediakan secara gratis tanpa batasan kuota khusus bagi warga Banten guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah tersebut.

"Cuma memang masyarakat Banten ini diberikan seperti program pemagangan Jepang gratis dari kuota tidak terbatas, yang daftar cuma 73. Untuk gratis ke Jepang," katanya, Minggu (6/9).

Rendahnya angka pendaftar ini memicu pertanyaan terkait efektivitas sosialisasi maupun tingkat minat warga. Pihak BBPVP Serang menegaskan bahwa informasi mengenai program-program yang ada di instansi tersebut telah disebarluaskan secara masif melalui berbagai saluran media sosial hingga koordinasi langsung dengan pemerintah daerah setempat.

"Di IG (instagram) kami sudah diwara-warakan (umumkan, red) lah bahasanya. Bahkan kami sudah komunikasi dengan beberapa kepala daerah. Yang daftar 300, 500. Daftar ulang tinggal sekian-sekian. Ada tes kemarin itu cuma 73," lanjutnya.

Pihak BBPVP Serang juga mengatakan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Bina Lattas (LAFKOT) untuk memastikan alokasi kuota program magang ke Japan tetap diprioritaskan bagi masyarakat di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

"Saya merasa karena saya minta kepada Direktur LAFKOT untuk program magang Japan ini untuk memberikan kuota lebih lah untuk Provinsi Banten," tegasnya.

Mayoritas anggaran Kemnaker yang dialokasikan melalui BBPVP Serang memang diprioritaskan untuk Provinsi Banten karena angka TPT daerah ini masih tergolong tinggi di tingkat nasional.

"Jadi sekitar hitungan saya 60 persen anggaran Kemnaker yang ada di Serang itu untuk Provinsi Banten. Sisanya baru Lampung, Sumsel (Sumatera Selatan)," terangnya.

Ady Nugroho menyampaikan, selain program pemagangan ke Jepang, BBPVP Serang juga membuka berbagai program pelatihan vokasi di sektor industri, perikanan, pertanian, hingga peluang kerja ke negara lain seperti Jerman.

Dia mengungkapkan, seluruh informasi pelatihan dan pendaftaran program pemagangan dibuka secara transparan dan dapat diakses publik melalui situs resmi bbpvpserang.kemnaker.go.id.

Oleh karena itu, masyarakat Banten diimbau untuk lebih aktif memanfaatkan berbagai fasilitas pelatihan gratis ini demi meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja di dalam maupun luar negeri.

Lebih lanjut, Ady mengatakan, BBPVP Serang juga memiliki jejaring dengan dunia industri melalui Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPID). Menurutnya, kebutuhan industri menjadi salah satu dasar dalam menentukan jenis pelatihan yang diberikan kepada masyarakat.

Ia memaparkan jika sistem yang pihaknya terapkan yakni dengan pendekatan Demand Driven yakni strategi bisnis dan rantai pasokan

ISTIMEWA

Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang Ady Nugroho

di mana digerakkan oleh permintaan nyata dari pelanggan secara real-time dan ukan sekadar mengandalkan perkiraan atau ramalan masa lalu. Oleh karena itu, setiap pelatihan diharapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, bukan sekadar memberikan keterampilan tanpa memperhitungkan peluang penyerapan tenaga kerja.

Ady mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki BBPVP Serang, tingkat kebekerjaan peserta pelatihan saat ini berada di kisaran 40 hingga 50 persen.

"Setiap lowongan itu kita tarik dulu, baru kita latih. Nah, ini sesuai arahan Pak Menteri, demand-driven," ungkapnya (MPD/RUS)

Bangunan Pasar Cipanas Jadi Proyek Mubazir

LEBAK, BANPOS - Bangunan Pasar Cipanas yang berlokasi di Desa Haurgajrug, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, hingga kini masih menjadi "proyek mubazir". Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menemui jalan buntu dalam merelokasi pedagang dari tepi jalan ke dalam gedung pasar lantaran terganjal pengaruh preman setempat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, Rully Edward, mengakui mengosongkan bahu jalan dan memindahkan aktivitas dagang ke fasilitas resmi bukan perkara mudah. Menurutnya, faktor kebiasaan dan mentalitas pedagang di wilayah Gajrug menjadi tantangan utama.

“Kami terus mengupayakan solusi agar bangunan pasar itu dimanfaatkan. Tapi ini memang berkaitan dengan masalah mentalitas. Di Gajrug itu berjualan di pinggir jalan seolah sudah menjadi tradisi atau adat,” katanya.

Padahal, lanjut Rully, sejak awal para pedagang sudah mendaftarkan diri dan menyatakan siap menempati kios yang disediakan. Pemkab pun memberikan kelonggaran dengan tidak memungut biaya sewa apapun, serupa dengan skema yang diterapkan di Pasar Semi.

“Awalnya mereka daftar dan ambil tempat karena memang tidak ada pungutan biaya. Namun, kenyataannya gedung tetap kosong dan mereka kembali ke jalan. Ini soal mentalitas,” tegasnya.

Rully mengungkapkan, kendala paling krusial di lapangan adalah adanya tekanan dari pihak tertentu yang menyewakan lahan pribadi di sepanjang jalan. Ia mensinyalir para oknum warga setempat sengaja menahan pedagang agar tidak pindah ke gedung pemerintah guna menjaga pendapatan pribadi mereka.

“Dugaannya memang ke sana. Saya menerima informasi, oknum yang menyewakan lahan di jalan itu menyuruh pedagang mengambil jatah kios di gedung pasar tapi melarang mereka untuk mengisinya.

Mereka tetap dipaksa berjualan di jalan meski itu melanggar aturan lalu lintas dan ketertiban umum,” ungkap Rully.

Kendati demikian, Disperindag menegaskan rencana relokasi tetap akan berjalan. Pemkab Lebak bakal menggunakan pendekatan persuasif melalui sosialisasi bertahap dan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan penataan.

Rully berkaca pada keberhasilan penataan Pasar Kalijaga yang membutuhkan fokus dan proses yang tidak instan.

“Pasar Cipanas pun akan kita perlakukan sama seperti Pasar Kalijaga. Kita harus fokus dan melalui tahapan yang jelas. Koordinasi dengan stakeholder terkait akan kami perkuat agar penertiban bisa dilakukan,” ujarnya.

Disinggung mengenai perawatan gedung yang kini mulai tidak terurus, Rully menyatakan anggaran pemeliharaan sarana perdagangan sangat terbatas. Tahun ini, Pemkab hanya mengalokasikan Rp35 juta untuk pemeliharaan seluruh pasar di Kabupaten Lebak.

“Anggaran pemeliharaan secara keseluruhan hanya Rp35 juta. Jadi penggunaannya akan sangat selektif, kami prioritaskan untuk kebutuhan yang paling mendesak saja agar aset negara tidak rusak total,” pungkasnya. (TQS/RUS)

Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo

DPRD Kota Tangerang Apresiasi Penyesuaian TPP PPPK Sebagai Bentuk Komitmen Bersama

DPRD Kota Tangerang menyambut baik langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang resmi menyesuaikan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis Penuh Waktu di lingkungan Pemkot Tangerang.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 903 Tahun 2026 tentang Pembayaran Besaran TPP PPPK, sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pemberian TPP ASN.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, mengapresiasi terealisasinya komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif ini. Kenaikan TPP sebesar 15 persen tersebut sejatinya telah disepakati dan dialokasikan dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2026.

"Alhamdulillah Perwal untuk kenaikan TPP PPPK teknis penuh waktu sudah selesai diproses. Sesuai komitmen Pemkot saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara forum PPPK dengan pihak Pemkot dan DPRD, hal ini akhirnya bisa terpenuhi," ujarnya saat ditemui, Kamis (3/9/26) kemarin.

Arief menjelaskan bahwa pencairan kenaikan TPP efektif dilakukan pada September 2026 karena proses administrasi memerlukan rekomendasi teknis dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri yang baru diterbitkan pada Juli lalu.

"Kenaikan 15 persen ini adalah dorongan dari Dewan agar kesejahteraan teman-teman PPPK tidak mengalami penurunan setelah beralih status. Walaupun kenaikan ini sifatnya sebagai tahap awal untuk memitigasi kesulitan yang ada, kami berharap ini menjadi stimulus peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, terkait aspirasi penyesuaian ijazah bagi PPPK, DPRD Kota Tangerang memastikan akan terus berkoordinasi secara proaktif dan kolaboratif dengan pemerintah pusat. Mengingat regulasi terkait PPPK secara umum merupakan kewenangan pemerintah pusat, DPRD bersama Pemkot Tangerang dan Forum PPPK terus mengupayakan jalan terbaik sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.

“Ya ini masih sedang kita koordinasikan dengan pusat. Karena sekali lagi kalau kita bicara PPPK penuh waktu atau PPPK secara umum ini ranahnya adalah kebijakan di pusat. Ini kita terus secara proaktif mengupayakan apa yang menjadi harapan teman-teman ini bisa direalisasikan,” pungkas Arief. (ADV)

ANTARA

Petani di Kabupaten Lebak Banten beralih profesi beragam mulai pedagang, buruh bangunan hingga mengojek akibat areal persawahan mengalami kekeringan dilanda kemarau panjang.

Dampak Kekeringan, Ratusan Petani Lebak Beralih Profesi

LEBAK, BANPOS - ?Ratusan petani petani di Kabupaten Lebak, sejak sebulan terakhir ini beralih profesi akibat kemarau panjang yang menyebabkan terjadi kekeringan di lahan pertanian padi sawah.

Ketua Kelompok Tani Sukabungah Desa Tambakbaya Kabupaten Lebak Ruhiana di Lebak, kemarin mengatakan sekitar 250 petani di sini beralih profesi karena lahan pertanian padi sawah mengalami kekeringan usai panen.

Mereka, menurut Ruhiana, beralih profesi sebagai pedagang keliling, pedagang eceran di Pasar Rangkasbitung dan Pasar Semi Narimbang.

Selain itu, lanjutnya, ada yang menjadi buruh bangunan, buruh panggul di Tanjung Priok Jakarta dan mengojek motor hingga penambang pasir.

Para petani yang beralih profesi tersebut, kata Ruhiana, ada yang bekerja keluar daerah, seperti Serang, Cilegon, Merak, Tangerang dan Jakarta.

Sedangkan petani yang memiliki cadangan pangan menghabiskan waktunya di rumah sambil memperbaiki peralatan pertanian, lanjutnya.

"Kehidupan petani sudah biasa jika kemarau panjang dipastikan beralih profesi untuk memenuhi ekonomi keluarga," katanya menjelaskan.

Ketua Kelompok Tani Blok Central Rangkasbitung Kabupaten Lebak Udin mengatakan petani di wilayahnya, sekitar 150 orang tidak bisa menggarap lahan pertanian akibat kekeringan, terdampak fenomena El Nino.

Karena itu, ia mengatakan kebanyakan petani di sini beralih profesi sebagai buruh bangunan proyek pembangunan di Jakarta.

"Kami bersama petani lainnya bekerja buruh bangunan di Jakarta dan setiap pekan pulang membawa uang untuk keluarga," katanya menjelaskan.

Abdulraup, seorang petani Warunggunung di Kabupaten Lebak mengatakan dirinya kini sudah tiga pekan berjualan bakso cuanki di Rangkasbitung akibat kekeringan sehingga tidak bisa melakukan gerakan tanam.

"Kami bersama 30 petani terpaksa berjualan bakso cuanki dengan pendapatan sistem komisi," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Dodi Hermawan mengatakan, diperkirakan ?petani di berbagai kecamatan di daerah itu beralih profesi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, se-hubungan kemarau yang mengakibatkan kekeringan.

"Kami memastikan setelah memasuki musim hujan, mereka kembali menggeluti usaha pertanian pangan," katanya.(ANT/RUS)

KKP Atur Tiga Tahap Usaha Budi Daya Lobster

JAKARTA, BANPOS - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatur kegiatan budi daya lobster menjadi tiga tahap untuk membuka peluang usaha bagi pembudi daya sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026.

"Segmentasi tersebut membuka peluang bagi pembudi daya untuk terlibat dalam rantai produksi sesuai kemampuan dan kapasitas usahanya," ujar Haeru dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (6/9).

Berdasarkan regulasi tersebut, tahap pertama berupa pendederan, yakni pemeliharaan Benih Bening Lobster (BBL) hingga mencapai ukuran 5 gram.

Tahap kedua berupa pembesaran pertama, yakni pemeliharaan lobster dari ukuran 5 gram hingga 50 gram.

Sementara tahap ketiga berupa pembesaran kedua, yakni pemeliharaan lobster mulai ukuran minimal 50 gram hingga mencapai ukuran konsumsi.

Hasil budi daya dari setiap tahap dapat didistribusikan di dalam wilayah Indonesia untuk melanjutkan kegiatan pendederan dan atau pembesaran dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Haeru, pembagian tahapan tersebut membuat proses produksi lobster dapat berkembang lebih terstruktur, mulai dari pendederan, pembesaran hingga menghasilkan lobster ukuran konsumsi.

Haeru menyebut selain pasar domestik, regulasi tersebut juga membuka peluang pemasaran lobster hasil budi daya ke luar negeri.

ANTARA/MARIA CICILIA GALUH

Arsip foto - Seorang petugas memperlihatkan seekor lobster budi daya yang berada di Modeling Budi Daya Lobster, di Balai Perikanan Budi Daya Laut, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (9/10/2024).

Lobster hasil budi daya dengan ukuran minimal 50 gram, kata dia, dapat dikeluarkan ke luar wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk dilengkapi surat keterangan asal lobster dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya atau dinas.

Ia menjelaskan pengembangan budi daya lobster tetap disertai ketentuan keberlanjutan sumber daya.

Pembudi daya diwajibkan melakukan penebaran kembali atau restocking paling sedikit dua persen dari hasil panen dengan ukuran minimal 50 gram per ekor.

Potensi pengembangan budi daya lobster tersebut terlihat di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. KKP mencatat terdapat 1.563 pembudi daya lobster di wilayah tersebut dan Lombok Timur menjadi salah satu sentra budi daya lobster di Indonesia.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan perkembangan budi daya lobster di Lombok Timur menunjukkan potensi Indonesia untuk menjadi salah satu produsen utama lobster hasil budi daya di pasar global.

"Kita ingin Indonesia tidak hanya menjadi negara sumber BBL, tetapi menjadi produsen utama lobster budi daya dunia," ujar Titiek saat kunjungan kerja ke Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok, Kamis (3/9).

Menurut Titiek, percepatan budi daya lobster perlu dilakukan dengan memperkuat seluruh mata rantai usaha, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan dan pembesaran, pakan, sarana Keramba Jaring Apung (KJA), permodalan, kelembagaan pembudi daya hingga kepastian pasar.(ANT)

ANTARA/MARWATI.

UPAYA pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jalan Senen, Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara.

Menyulap Jeans Bekas Menjadi Karya Ekonomi Ramah Lingkungan

DERU mesin jahit memecah kesunyian pagi di sebuah rumah kontrakan sederhana di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Irama jarum yang naik turun tanpa henti menjadi penanda dimulainya aktivitas produksi. Di atas meja kerja, potongan-potongan kain jeans bekas tersusun rapi menunggu giliran untuk dijahit. Sesekali, Bunay Ilhamullah (23) sang perajin menghentikan laju mesin, memeriksa hasil jahitan, lalu kembali menyambungkan potongan demi potongan kain hingga perlahan membentuk sebuah produk baru.

Foto dan Teks : **Akramul Muslim**
Editor : **Yusran Uccang**

Menurut Bunay, setiap lembar jeans bekas bukanlah limbah yang tidak nilai. Melalui proses ketelitian, kesabaran, dan kreativitas tinggi, bahan yang kerap berakhir di tempat pembuangan itu justru menjadi hal yang bernilai dan bermanfaat seperti tas, pakaian, dompet, gantungan kunci, dan hingga sepatu.

Kain jeans bekas dibentangkan di ruang tengah rumah kontrakannya, lalu ia menarik garis menggunakan kapur jahit berwarna kuning. Penggaris lengkung, meteran, dan gunting menjadi alat yang tak pernah jauh dari jangkauannya. Setiap pola diukur dengan cermat agar seluruh potongan kain dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menyisakan banyak limbah baru.

Kecintaan Bunay terhadap material denim menjadi alasan utama memilih kain jeans sebagai bahan baku. Di balik tampilannya yang kuat dan digemari berbagai kalangan, denim merupakan salah satu jenis tekstil yang membutuhkan sumber daya besar dalam proses produksinya. Mulai dari penggunaan air, energi, hingga bahan kimia dalam proses pewarnaan yang seluruh tahapan tersebut memiliki jejak lingkungan yang tidak sedikit. Kesadaran itulah yang mendorong Bunay membangun sebuah usaha fesyen berbasis fabric art yang berfokus pada transformasi limbah jeans menjadi produk dengan fungsi, nilai, dan cerita baru.

Usaha tersebut mulai dirintis pada Agustus 2024 di Banda Aceh. Berbekal pendanaan Program Pembinaan Internal Kewirausahaan (PIKU) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh sebesar delapan juta rupiah yang diberikan secara bertahap, Bunay membeli sebuah mesin jahit, perlengkapan menjahit, bahan pendukung, serta mengumpulkan jeans bekas yang diperoleh dari teman, pelanggan, maupun masyarakat yang ingin menyumbangkan pakaian lamanya.

Perjalanan membangun usaha itu tidak selalu berjalan mulus. Meski ayahnya berprofesi sebagai penjahit, ia mengaku tidak pernah mendapatkan pendidikan menjahit secara formal. Pengetahuan yang dimilikinya diperoleh secara otodidak melalui berbagai video pembelajaran di media sosial, dipadukan dengan pengalaman mengamati ayahnya bekerja sejak kecil. Berulang kali ia mencoba membuat pola, membongkar hasil jahitan yang kurang rapi, hingga mengulang proses dari awal sebelum akhirnya menghasilkan produk yang layak dipasarkan.

Seluruh proses produksi masih dikerjakan sendiri dari rumah kontrakannya. Dalam sebulan ia mampu menghasilkan sekitar 100 produk yang terdiri atas tas, pakaian, dompet, gantungan kunci, hingga sepatu. Produk-produk tersebut dipasarkan dengan harga mulai dari Rp25 ribu hingga Rp500 ribu, tergantung tingkat kesulitan dan bahan yang digunakan.

Pemasaran dilakukan melalui berbagai platform media sosial, sekaligus menitipkan produk di sejumlah toko fesyen di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Aceh Selatan. Sebagian besar pesanan datang melalui media sosial, yang sekaligus menjadi sarana memperkenalkan konsep fesyen berkelanjutan kepada masyarakat.

Selain membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM, pemanfaatan limbah tekstil menjadi produk baru juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Melalui berbagai program pengembangan UMKM, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi promosi produk lokal, hingga perluasan akses pasar, pemerintah mendorong lahirnya usaha-usaha kreatif yang mampu meningkatkan nilai tambah limbah sekaligus mengurangi beban lingkungan.

Di tengah pertumbuhan industri fesyen yang terus meningkat, persoalan limbah tekstil menjadi tantangan tersendiri. Menurut data Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia menghasilkan sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil per tahun.

Sebagian besar limbah tersebut belum dikelola secara optimal sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Melalui Peta Jalan Ekonomi Sirkular Indonesia, pemerintah menjadikan sektor tekstil sebagai salah satu sektor prioritas untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, memperpanjang masa pakai produk, serta mendorong pemanfaatan kembali limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah sekaligus memperkuat daya saing industri dan UMKM yang menerapkan konsep fesyen berkelanjutan.

Melalui pendekatan upcycling, teknik patchwork, distressing, dan berbagai metode fabric art, pengrajin mengubah limbah jeans menjadi produk yang unik dan bernilai. Setiap karya dibuat dengan tangan, menghargai karakter asli material, serta merayakan ketidaksempurnaan sebagai bagian dari keindahannya.

Praktik tersebut menjadi salah satu contoh penerapan ekonomi sirkular di tingkat pelaku usaha. Material yang sebelumnya dianggap sebagai limbah memperoleh fungsi baru tanpa harus melalui proses produksi bahan baku dari awal. Selain mengurangi timbulan sampah tekstil, pendekatan tersebut juga membuka peluang usaha baru, meningkatkan nilai tambah produk, serta mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis keberlanjutan.

Bagi Bunay keberlanjutan bukan hanya tentang menciptakan produk fesyen, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap limbah. Kain jeans yang dianggap usang sebenarnya masih menyimpan potensi untuk dimanfaatkan kembali.

Melalui karya-karyanya, ia berharap semakin banyak orang menyadari bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana, yakni memberi kesempatan kedua kepada material yang pernah dianggap tidak lagi berguna, sebagai solusi atas persoalan limbah tekstil. Upaya sederhana tersebut menjadi gambaran bahwa ekonomi sirkular dapat dimulai dari skala usaha kecil, ketika kreativitas mampu mengubah barang yang dianggap usang menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi lingkungan.(***)